



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBELUM DAN
SETELAH DILAKUKAN PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

OLEH :

JOKO ARYANTO, S.H.

NIM : B4B 000147

PEMBIMBING :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBELUM DAN
SETELAH DILAKUKAN PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Disusun Oleh :


Joko Aryanto, S.H.

Nim : B4B 000147

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Desember 2002

Tesis ini telah diterima sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan
pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro
S e m a r a n g

Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

NIP. 130 350 519

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, S.H.

NIP. 130 359 063

*Good writing doesn't come naturally,
through most people
obviously think it does.*

*Good writing takes self-discipline and,
very often, self-knowledge.*

(Penulisan yang baik tidak tiba secara alami,
walaupun kebanyakan orang
nyata-nyata berpikir hal itu demikian.)

Penulisan yang baik mensyaratkan disiplin diri dan
seringkali Pengetahuan mengenai diri sendiri)

(*The Liang Gie*, mengutip dari *William Zinsser*)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat kasih dan karuniaNya yang begitu besar yang telah dilimpahkan kepada penulis, maka tesis ini dapat diselesaikan penulisannya dengan judul TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis dengan hati yang tulus untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada yang kami hormati – guru besar kami – Ibu **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.**, yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga kepada penulis dan dengan tekun serta kesabaran yang tinggi dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis juga banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak **Prof. IGN. Sugangga, S.H.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ;
3. Bapak **R. Suharto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ;
4. Bapak **DR. Nyoman Serikat Putera Jaya, S.H., M.H.**, selaku dosen wali dari penulis ;
5. Bapak dan Ibu dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis ;
6. Seluruh civitas akademika Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan ;
7. Bapak **Achmad Yunus**, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Pontianak, yang telah berkenan memberikan data pada saat penulis melakukan penelitian ;
8. Para Notaris dan Direksi Perseroan Terbatas di Pontianak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data-data dan penjelasan pada saat penulis melakukan penelitian ;

9. Rekan-rekan mahasiswa peserta Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, angkatan Tahun 2000/2001, atas semangat kebersamaan yang telah kita jalani bersama selama mengikuti perkuliahan, telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini ;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang khusus kepada isteri tercinta **Helena Felisia Lina, A.md.** yang telah memberikan pengorbanan atas tersitanya waktu dan perhatian oleh penulis dalam proses dilakukannya penelitian ini, karena dorongan serta semangat yang tak pernah padam inilah yang memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Demikian tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Bong Lim On** dan Ibu **Tan Lie Bwe** yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan dan menuntun penulis sejak kecil hingga menginjak dewasa, dan atas dorongan dan motivasi dari mereka pulalah sehingga proses penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menaruh perhatian, dan secara khusus dalam memberikan wujud nyata untuk pengabdian serta sumbangan pemikiran kepada almamater yang saya cintai yakni, **Universitas Diponegoro** di Semarang.

Semarang, 19 Desember 2002

Penulis

Joko Aryanto

ABSTRACT

One form of companies in economic field, which is most preferred nowadays, is the limited liability company abbreviated Ltd. (PT). This resulted from the specific characteristics of this form of company not found in the other forms of companies, such as the civil trading-company (*Maatschap*), the firm, or the limited partnership (C.V.). The specifications of a limited liability company are, among other things, as a capital association, and as an independent corporate body institution. This means that the PT except as a capital association, it also has separated assets from the assets of its shareholders. In addition, there is the separation of function and responsibility between its shareholders and its management/ board of directors.

After almost one and a half-century, the PT was regulated under chapter 36 to 56 of the Civil Code of Law or KUHD (*Staatsblad* 1847: 23) prepared by the Netherlands East Indies government, had been hold since May 1, 1848. Then in 1995, the PT had just been regulated in the new act, The Act Number 1 Year 1995 over the Limited Liability Company (abbreviated UUPT). This new act considered as progressively better, if it was compared to chapter 36 to 56 of KUHD, because there were many new matters regulated in it. These new matters among other things covered the obligation of *registration* and *announcement* of the limited liability company, included its responsibility if the obligation was not performed (chapter 21 and 22 *juncto* chapter 23 UPPT), the capitalization structure, the establishment period of the limited liability company, and issues related with *merger*, *acquisition*, and *consolidation*.

The obligation of *registration* and *announcement* of limited liability company is a very important obligation. If this obligation was not settled, this would result in the legal consequence for the board of directors of the company. The concerned legal consequence regulated in chapter 23 of UUPT, stated that "*The board of directors responsible in a chain of obligation over all legal acts carried out for and in the name of the company, which has not yet performed the registration and announcement, without involving the company's corporate body institution for responsible too.*" The responsibility of the company's corporate body institution was not regulated, this resulted in the mismatch with the legal proposition found in chapter 7 paragraph (6) of the UPPT, stated that "*a limited liability company has had the status as a corporate body, when it had obtained legalization from the Minister of Justice.*" This means that the company, which had achieved the status as a corporate body, has had the legal right and obligation also its own assets.

Thus, it could be concluded, "it is not fair" if the responsibility of the board of directors of a limited liability company, which company has not yet registered as – grammatically – regulated in chapter 23 of the Act Number 1 Year 1995, which stated that the legal responsibility over all

legal acts performed by the Board of directors is the responsibility of the Board of directors in a chain without involving the company's corporate body institution for responsible too.

Therefore, in the renewal plan of the Act Number 1 Year 1995, it should be noticed in case of changing chapters, which in particular regulated about the form of legal responsibility charged upon the Board of directors of the limited liability company, without ignoring the responsibility of the company's corporate body institution itself, in which in the legal theory manner, the company has had the independent legal position, which means that the company has had the right and obligation. All of them are aimed at a legal protection for good will third parties.

ABSTRAK

Salah satu bentuk badan usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai pada saat ini adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang biasa disingkat dengan PT. Hal ini disebabkan, karena bentuk badan usaha PT ini mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain, misalnya pada persekutuan perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma, maupun persekutuan komanditer (C.V). Kekhususan yang dimiliki oleh PT adalah antara lain merupakan suatu asosiasi modal, dan sebagai institusi badan hukum yang mandiri. Artinya PT selain sebagai asosiasi modal, ia juga memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya, serta adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurus / Direksi perseroan.

Setelah hampir satu setengah abad, PT diatur dalam pasal 36 sampai dengan 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (*Staatsblad* 1847 : 23) yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda, diberlakukan sejak 01 Mei 1848 , kemudian baru pada tahun 1995, PT ini diatur dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-Undang ini dapat dikatakan lebih maju, bila dibandingkan dengan pasal 36 sampai dengan 56 KUHD, sebab banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya. Hal-hal baru tersebut diantaranya, meliputi kewajiban *pendaftaran* dan *pengumuman* perseroan yang disertai dengan tanggung-jawabnya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan (pasal 21 dan pasal 22 *juncto* pasal 23 UUPT), struktur permodalan, jangka waktu pendirian perseroan, dan hal-hal yang berkaitan dengan *merger*, *akuisisi*, dan *konsolidasi*.

Kewajiban *pendaftaran* dan *pengumuman* perseroan terbatas merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting, karena bila tidak dilakukan, maka akan membawa konsekuensi hukum bagi Direksi perseroan tersebut. Konsekuensi hukum yang dimaksud diatur dalam pasal 23 UUPT, yang menyatakan bahwa "*Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama perseroan yang belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman tanpa melibatkan institusi badan hukum perseroan untuk ikut bertanggung jawab*". Dengan tidak diaturnya tanggung jawab Institusi badan hukum perseroan tersebut, telah menimbulkan *ketidak selarasan* dengan kaidah hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (6) UUPT yang menyatakan bahwa "*suatu perseroan terbatas telah memiliki status badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman*". Artinya bahwa perseroan yang telah berstatus badan hukum tersebut telah memiliki hak dan kewajiban hukum serta harta kekayaan tersendiri.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, sangatlah "tidak adil" apabila tanggung jawab hukum Direksi perseroan terbatas yang perseroannya belum didaftar dan diumumkan sebagaimana – secara gramatikal – diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi adalah merupakan tanggung jawab Direksi secara renteng dengan tidak melibatkan institusi badan hukum perseroan terbatas untuk ikut bertanggung jawab.

Oleh karena itu, maka dalam rencana pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hendaknya diperhatikan dalam hal perubahan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Direksi perseroan terbatas, dengan tanpa mengeyampingkan tanggung jawab institusi badan hukum perseroan itu sendiri, di mana secara teori hukum, perseroan tersebut telah memiliki kedudukan hukum yang mandiri yang berarti telah mempunyai hak dan kewajiban. Ini semua diharapkan agar nantinya dapat terciptanya suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Permasalahan	16
C. Kerangka Teori	17
D. Tujuan Penelitian	27
E. Metodologi Penelitian	28
1. Metode Pendekatan ;	28
2. Spesifikasi Penelitian	29
3. Langkah-langkah Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	34
1. Pengertian Badan Hukum Perseroan Terbatas	34
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas	36
3. Saat Mulainya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	39
4. Pendirian Perseroan Terbatas	40
a. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan ;	42
b. Pengesahan Menteri Kehakiman	44
c. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan	46
5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.	50
6. Pembubaran dan Hapusnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	54

B. Kekuasaan, Wewenang dan Tanggung Jawab Organ	
Perseroan Terbatas	58
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	59
a. Kekuasaan dan Wewenang RUPS ;	59
b. Penyelenggaraan dan Sistem Pengambilan Keputusan dalam RUPS ;	62
2. Direksi Perseroan	67
a. Kekuasaan dan Wewenang Direksi ;	68
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi ;	71
3. Komisaris Perseroan	75
a. Kekuasaan dan Wewenang Komisaris ;	76
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Komisaris ;	78
C. Tanggung Jawab Direksi dan Badan Hukum	
Perseroan Terbatas	80
1. Tanggung Jawab Direksi Perseroan	80
a. Tanggung Jawab Intern	81
1) Tanggung Jawab kepada Perseroan ;	81
2) Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham Perseroan ;	83
b. Tanggung Jawab Ektern (Kepada Pihak Ketiga)	84
1) Hal Pemberian Keterangan yang Tidak Benar ;	85
2) Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit de Charge</i>)	86
2. Tanggung Jawab Renteng Direksi Perseroan Terbatas	89
a. Tanggung Jawab Sebelum Perseroan Disahkan	89
b. Tanggung Jawab Setelah Perseroan Disahkan Tetapi Belum Didaftarkan dan Diumumkan	90
c. Tanggung Jawab Setelah Perseroan Didaftarkan dan Diumumkan	93

3. Perbuatan dan Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas	95
a. Tanggung Jawab Hukum Sebelum Perseroan Didirikan	95
b. Perbuatan dan Tanggung Jawab Sebelum Perseroan Disahkan	98
c. Tanggung Jawab Hukum Setelah Perseroan Disahkan	103
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	106
A. HASIL PENELITIAN	106
1. Tanggung Jawab Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Disahkan	106
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);	107
b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).	110
2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Sebelum Perseroan Terbatas Didaftar dan Diumumkan	113
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);	114
b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).	117
3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Setelah Perseroan Terbatas Didaftar dan Diumumkan	127
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);	127
b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).	129
B. PEMBAHASAN	133
1. Tanggung Jawab Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Disahkan	133
a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);	134
b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 (UUPT).	137

2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Sebelum Perseroan	
Terbatas Didaftar dan Diumumkan	149
a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum	
Dagang (KUHD);	151
b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan	
Terbatas Tahun 1995 (UUPT).	156
3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Setelah Perseroan	
Terbatas Didaftar dan Diumumkan	180
a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum	
Dagang (KUHD);	181
b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan	
Terbatas Tahun 1995 (UUPT).	185
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	190
A. Kesimpulan	190
B. Rekomendasi	196
DAFTAR PUSTAKA	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT, merupakan salah satu bentuk badan usaha di dalam kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas,¹ PT juga memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan sahamnya – kepada setiap orang – dengan menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selain itu PT juga merupakan asosiasi modal dan badan hukum mandiri, dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum mandiri, karena mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. sebagai asosiasi modal ;
- b. kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham ;
- c. tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada modal yang disetor ;
- d. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus / Direksi ;
- e. mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas ;
- f. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

¹ artinya para pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995), yang sekaligus sebagai ciri dasar dari perseroan.

Dalam salah satu tulisannya, **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.** menyatakan bahwa, Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena : ²

1. mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih, dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya ;
2. mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya ;
3. dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional ;
4. perseroan terbatas mampu melakukan kerjasama antara perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham). Tanpa memperdebatkan aspek hukum mengenai berdirinya maupun keberadaannya, perseroan terbatas sebagai kesatuan modal yang kedudukannya sebagai badan hukum (apakah berdasarkan perjanjian atau karena teori badan hukum), PT dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu khusus mengenai modal, baik undang-undang yang lama (KUH Dagang) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan rambu-rambu tertentu untuk menjaga keseimbangan setiap kepentingan yang ada di dalamnya.

Dalam kepustakaan, acapkali perseroan terbatas dibedakan antara *PT Tertutup* dan *PT Terbuka*. *PT Tertutup* adalah PT yang didirikan

² Sri Redjeki Hartono, Prof., Dr., S.H., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, cetakan ke-1 (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2000), halaman 4 – 5.

dengan tidak ada maksud untuk menjual saham kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Dengan perkataan lain, tujuan pendirian PT tersebut tanpa sedikitpun untuk menghimpun dana (asosiasi modal). PT tertutup ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT Tertutup sering juga disebut *PT biasa* untuk membedakan dengan PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PT PMA (Penanaman Modal Asing) dan PT PERSERO (Perusahaan Perseroan). Sebaliknya PT Terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui pasar modal, dalam rangka sebagai salah satu cara memupuk modal untuk investasi pada usaha PT tersebut, yaitu yang dewasa ini disebut dengan istilah "*go public*". PT Terbuka ini diatur pada pasal 1 ayat (6) UUPT yang merumuskan, bahwa PT Terbuka adalah perseroan :

1. yang jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu ; atau
2. perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PT Terbuka selain diatur dalam UUPT, juga diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Dalam pasal 1 angka (22) UUPM ini memberikan kriteria, berapa besar modal yang harus dimiliki PT dan berapa banyak pemegang sahamnya. Pasal tersebut menyatakan, bahwa agar PT dapat dikategorikan sebagai PT Publik, maka harus memenuhi syarat-syarat :

1. sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham, dan
2. memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian, PT Terbuka yang memenuhi kriteria tersebut di atas, sekalipun tidak menjual sahamnya melalui pasar modal, namun wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur untuk pasar modal, termasuk dan khususnya tentang pelaporan terhadap Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan transparansi pengumuman kepada masyarakat yang menyangkut segi finansialnya.³

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut diundangkan untuk menggantikan berlakunya :

1. Buku I ; Bab III, Bagian ke-3 ; pasal 36 – 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847 : 23*), kecuali segala peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 berikut segala perubahannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ;
2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij Op Aandelen : Staatsblad 1939 : 569 jo 717*).

³ Rudhi Prasetya, Prof., Dr., S.H., *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-3, (Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 112.

Salah satu alasan yang dijadikan pertimbangan untuk pembaruan undang-undang perseroan terbatas seperti yang tercantum dalam konsiderannya, adalah bahwa " Peraturan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Sebagaimana diketahui, KUHD dibuat lebih dari satu abad yang lalu yang tentu sudah tidak lagi dapat mengikuti kebutuhan perkembangan perekonomian saat ini dan sudah '*out of date*', sehingga banyak hal-hal baru yang perlu diakomodasi dalam undang-undang tersebut ".

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 07 Maret 1995, dan ditetapkan untuk berlaku efektif terhitung 07 Maret 1996 tersebut mengandung banyak hal-hal baru, antara lain tentang pendaftaran dan pengumuman, struktur permodalan, jangka waktu berdirinya perseroan dan hal-hal yang berkaitan dengan *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi* suatu perseroan. Karena banyak hal-hal baru tersebut, yang tentunya selain harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang baru akan dibentuk, demikian juga bagi perusahaan-perusahaan yang telah ada sebelum efektif berlakunya undang-undang ini telah diberikan toleransi waktu untuk melakukan penyesuaian diri sesuai dengan undang-undang ini hingga 07 Maret 1998. Dari banyak penyesuaian yang harus dilakukan, pendaftaran dan pengumuman perseroan merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting untuk

dilakukan. Karena bila hal itu tidak dilakukan, maka akan membawa konsekuensi hukum bagi Direksi – maupun badan hukum – perseroan itu sendiri, yaitu menyangkut pertanggungjawaban hukum atas semua perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan tersebut.

Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik orang pribadi maupun badan hukum. Namun persyaratan ini dikecualikan bagi PT PERSERO, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, dikarenakan PERSERO mempunyai status dan karakteristik yang khusus. Mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas dapat digambarkan ke dalam empat tahap berikut :

1. Tahap Pembuatan Akta Pendirian

Pada tahap ini yang merupakan tahap pertama dari pendirian perseroan terbatas, para pendiri perseroan diwajibkan – dengan ancaman batal – untuk membuat akta pendirian perseroan harus dalam bentuk akta otentik, *"in casu"* dengan akta notaris. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT. Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa *"Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia"*. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perd).

Artinya, bahwa perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH.Perd, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT tersebut. Dengan demikian, maka undang-undang ini berlaku prinsip, bahwa pada dasarnya suatu badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan – oleh Menteri Kehakiman – kemudian jumlah pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang masih ada wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta dalam suatu perkawinan). Jika ternyata waktu enam bulan yang ditetapkan tersebut terlampaui, dan pemegang saham tetap kurang dari dua orang dan belum mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, maka dalam hal ini pemegang saham akan bertanggung-jawab secara pribadi, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum perseroan.

2. Tahap Pengesahan Menteri Kehakiman

Akta pendirian perseroan terbatas yang notarial tersebut haruslah diajukan ke Departemen Kehakiman untuk mendapatkan

pengesahan dari Menteri Kehakiman (pasal 7 ayat (6) UUPT). Artinya, bahwa apabila akta pendirian perseroan terbatas tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka perseroan terbatas belum memiliki status badan hukum, dan belum dapat diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, yang akan memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Dengan demikian, maka "saat" pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian yang dimaksud.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan tersebut disahkan, akan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila :

- a. Perseroan terbatas secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
- b. Perseroan terbatas secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan terbatas itu ;
- c. Perseroan terbatas mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu.

Sedangkan pada penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa ketentuan ini mengatur tentang tata cara yang harus ditempuh untuk

mengalihkan tanggung jawab dari pendiri kepada perseroan, yakni menyangkut hak dan tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri perseroan, yang dibuat setelah perseroan terbatas didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum. Dalam Penjelasan tersebut tidak dijelaskan, Kapan suatu perseroan terbatas itu sudah dapat dikatakan telah didirikan, tetapi bila dilihat dari proses pendirian suatu perseroan terbatas, yang dimulai dengan pembuatan akta pendiriannya lalu pengesahan, maka sudah pasti yang dimaksud setelah perseroan terbatas didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, adalah Waktu antara setelah ada akta pendirian sampai dengan diberikannya pengesahan.

3. Tahap Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan

Pasal 21 UUPT menyatakan, bahwa Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal-hal yang harus didaftarkan berdasarkan pasal 21 UUPT tersebut adalah :

- a. akta Pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- b. akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ;

- c. akta perubahan anggaran dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri sesuai dengan pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pendaftaran akta pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas, wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan. Menurut pasal ini, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi perseroan. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal 23 UUPT yang menyatakan, bahwa *"Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan"*.

Karena pasal itu menetapkan Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng hanya dalam hal perseroan belum "didaftar" dan "diumumkan", maka apakah hal ini berarti bahwa sepanjang akta pendirian dan pengesahannya telah didaftarkan namun belum diumumkan maka tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng tersebut juga telah berlaku ? Kemudian bagaimanakah tanggung jawab badan hukum perseroan itu sendiri, yang telah memiliki status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan Menteri-

Kehakiman ? Apakah juga ikut bertanggung jawab ? Kiranya hal ini perlu penjelasan yang lebih tegas dalam undang-undang tersebut.

4. Tahap Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara

Ini adalah tahap terakhir dari proses pendirian perseroan terbatas, yakni mengumumkan anggaran dasar perseroan tersebut kedalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 22 UUP. Permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekali lagi, ketentuan pasal 23 UUP menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diancam dengan sanksi pidana dan perdata. Sanksi perdata, bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia menurut UUP. Sedangkan sanksi pidana, Direksi terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang

apabila dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban, diancam dengan pidana atau denda.

Dari tahap-tahap pendirian perseroan terbatas di atas, maka menjadi jelas bahwa, sesuai dengan pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan terbatas akan menjadi badan hukum saat setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Hal ini berarti bahwa sebelum pengesahan itu, badan hukum perseroan belum "lahir" dan belum dapat berlaku sebagai subjek hukum. Karena itu, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitas sebagai subjek hukum yang berbadan hukum, atau tidak dapat mengikatkan diri sebagai pihak dalam perjanjian. Tetapi setelah perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka sejak saat itu pula perseroan "lahir" secara hukum sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Legal Entity*. Dengan demikian maka sejak saat perseroan terbatas itu menjadi badan hukum, barulah perseroan itu dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri (yang memiliki harta kekayaan sendiri).

Mengenai hal tersebut, **Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama** menyatakan, bahwa sesuai dengan "asas publisitas", dapat dibenarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh **Hayati Surorejo, S.H.** (salah seorang pejabat perundang-undangan Departemen Kehakiman) bahwa, *"Status hukum perseroan terbatas sudah diperoleh dengan adanya*

pengesahan oleh Menteri Kehakiman".⁴ Hal ini juga pernah ditegaskan pula – pada Yurisprudensi – dalam putusan Mahkamah Agung No.297 K/SIP/1974, tertanggal 21 Desember 1976 yang menyatakan, bahwa "*Dengan adanya pengesahan dari Departemen Kehakiman, maka status badan hukum sudah diperoleh walaupun belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri*".⁵ Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung No.1139 K/Sip/1973, tertanggal 16 Juni 1976 yang menyatakan, bahwa "*Kelalaian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertera pada pasal 38 KUHD (pendaftaran dan pengumuman) tidak menyebabkan badan perusahaan yang bersangkutan kehilangan status badan hukumnya*".⁶ Sejalan dengan itu, status badan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting, sebab dengan diperolehnya status badan hukum, maka mengakibatkan tanggung jawab hukum secara pribadi (*personal liable*) dari para pendiri perseroan – dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perseroan – akan beralih kepada badan hukum, karena badan hukum tersebut telah memperoleh harta kekayaan sendiri. Dengan pengertian lain, bahwa mereka (para pendiri perseroan) akan bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi, atas segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan dan segala tagihan pihak ketiga

⁴ Sudargo Gautama, Prof.,Mr.,Dr., *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 – Perbandingan dengan Peraturan Lama*, cetakan ke-1, (Bandung – PT. Citra Aditya Bakti, 1995), halaman 9-10.

⁵ Chidir Ali, S.H., *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), halaman 310.

⁶ *Ibid*, halaman 291.

terhadap perseroan, apabila status badan hukum perseroannya belum diperoleh. Tetapi jika sudah diperolehnya status badan hukum tersebut, maka tanggung jawab mereka ini tidak lagi menjadi pribadi, tetapi perseroan sendiri yang sudah berstatus badan hukum itulah yang bertanggung jawab atas segala hutang-hutang daripada perseroan bersangkutan.

Apabila disimak lebih jauh ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka status badan hukum yang diperoleh setelah akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman menurut pasal 7 ayat (6) UUPT, akan menjadi "*kabur*". Hal ini ternyata jika kita meneliti lebih mendalam pasal 23 UUPT yang menyatakan, bahwa "*Selama pendaftaran dan pengumuman seperti dimaksudkan dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan,* ⁷ *maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung-jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan itu*". Dengan demikian berarti bahwa, pemenuhan tanggung jawab tersebut hanya dibebankan kepada Direksi perseroan saja tanpa melibatkan badan hukum perseroan, padahal menurut asas hukum yang berlaku, badan hukum perseroan tersebut seharusnya juga harus ikut bertanggung jawab, karena telah memiliki status badan hukum (*persona standi in*

⁷ artinya bahwa apabila akta pendirian perseroan yang telah memperoleh pengesahan Menteri, namun *belum didaftarkan* dalam Daftar Perusahaan dan *dimumkan* dalam Tambahan Berita Negara.

judicio) yang memiliki harta kekayaan sendiri sebagaimana yang diatur pada pasal 7 ayat (6) UUPT.

Agar dapat berlaku terhadap umum, maka sistem pendaftaran di Daftar Perusahaan menurut pasal 21 UUPT serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (pasal 22 UUPT) memang merupakan suatu syarat yang lazim diminta. Namun demikian, pasal 23 UUPT yang menyatakan, bahwa Direksi secara tanggung renteng – *tanpa melibatkan badan hukum perseroan* – untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi perseroan yang belum didaftarkan maupun diumumkan, menunjukkan tidak adanya "keselarasan" antara ketentuan pasal 23 UUPT tersebut dengan asas hukum yang berlaku, yakni tentang tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga badan hukum sebagaimana yang telah diperolehnya berdasarkan pasal 7 ayat (6) UUPT. Dengan demikian maka menjadi "kabur" apa yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (6) UUPT tersebut, sebab bukankah dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perseroan sudah memperoleh status badan hukum ? Artinya badan hukum ini adalah orang tersendiri yang dapat bertindak dalam hukum dengan harta yang terpisah (*assets, aktiva dan pasiva*) daripada harta pribadi Direksinya.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dapat dimengerti bahwa tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini adalah untuk melindungi pihak ketiga. Karena dengan demikian pihak ketiga dapat mengetahui mengenai

struktur hukum dari badan hukum itu, siapa-siapa yang berhak bertindak sebagai organ dan sebagainya. Sehingga dapat diterima bahwa, kelalaian dari pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman mempunyai akibat hukum kepada para pengurus, untuk secara pribadi bertanggung jawab secara tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Namun demikian, badan hukum perseroan itu dengan sendirinya juga harus ikut terikat dan dapat diminta pertanggungjawabannya disamping pertanggungjawaban para pengurus secara pribadi. Menurut hemat penulis, hal ini perlu mendapatkan penjelasan yang lebih tegas lagi, khususnya pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, karena didalam praktek, para pengurus perseroan tidak jarang sudah ada yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga, walaupun belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang dimaksudkan di atas, bahkan pengurus perseroan ada yang "berani" juga melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebelum badan itu disahkan oleh Menteri Kehakiman.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Subbab Latar Belakang tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab *pendiri* perseroan terbatas, atas semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya baik atas nama maupun tidak atas nama perseroan yang **belum** memperoleh *pengesahan* dari Menteri Kehakiman ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab *Direksi* perseroan terbatas atas perbuatan hukum yang dilakukannya untuk kepentingan badan hukum perseroan yang **belum** *didaftar* dan *diumumkan* berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab *Direksi* perseroan terbatas atas semua perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang **telah** *didaftarkan* dan *diumumkan* sesuai dengan pasal 21 *juncto* pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ?

C. KERANGKA TEORI

Untuk mendukung dasar pemikiran dalam melakukan penelitian ini, penulis kemukakan beberapa pendapat para sarjana yang ditemukan selama mengadakan studi kepustakaan, yakni :

Dr. Theo Huijbers menyatakan, bahwa Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia, bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral. Tetapi kehendak yang sama, juga mendorong orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut.

Hal ini dilaksanakan dengan membentuk sistem norma-norma yang harus ditaati oleh orang-orang yang termasuk dalam suatu masyarakat tertentu.

Kehendak untuk mengatur hidup bersama, menghasilkan tiga macam norma, yakni : *moral*, *sopan santun* dan *hukum / yuridis*. Norma hukum / yuridis mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam asas-asas hukum, yang merupakan prinsip-prinsip dasar atau fundamen dari hukum itu sendiri.⁸ Asas-Asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, yang juga merupakan titik tolak bagi pembentukan serta interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri. Selanjutnya, asas-asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas-asas hukum *objektif* yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum; sedangkan asas-asas hukum *subjektif* yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.⁹

Dalam sistem hukum yang disebut Kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan ; "*hukum adalah undang-undang yang adil*". Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, yang sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi.¹⁰

⁸ Huijbers, Theo, Dr., *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1990), halaman 63.

⁹ *Ibid*, halaman 79.

¹⁰ *Ibid*, halaman 69.

Dalam pergaulan antar pribadi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan moral tersebut, tidak hanya dilakukan semata-mata oleh manusia (*natuurlijkpersoon*) saja, namun dapat pula dilakukan oleh suatu badan – dengan perantaraan organnya – yang dipersamakan dengan manusia yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Mengenai hal tersebut, **Drs. C.S.T. Kansil, S.H.**, menyatakan bahwa disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.¹¹ Sebagai salah satu subjek pendukung hak dan kewajiban, **Surojo Wignjodipuro, S.H.** menyatakan, bahwa badan hukum adalah tiap pendukung hak yang bukan manusia. Jikalau beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, seperti antara lain :¹²

¹¹ Kansil, C.S.T., Drs., S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-6, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1984), halaman 118.

¹² Surojo Wignjodipuro, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, (Jakarta : Penerbit Gunung Agung, 1983), halaman 40.

1. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya ;
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggota-anggotanya.

Pandangan bahwa, badan hukum sebagai pendukung serta pembawa hak dan kewajiban, **Ali Rido, S.H.** menyatakan, bahwa dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijkpersoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechts figuur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum.¹³

Dalam sejarah perkembangan badan hukum dewasa ini, ada beberapa teori mengenai badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin, untuk membenaran atau memberikan dasar hukum baik bagi "lahirnya" maupun kepribadian (*rechtspersoonlijkheid*) badan hukum itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh **Chidir Ali, S.H.**, mengenai teori-teori yang menjadi dasar hukum dari badan hukum tersebut, sebagai berikut :¹⁴

¹³ Ali Rido, S.H., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Yayasan, Wakaf*, cetakan ke-4, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), halaman 3.

¹⁴ Chidir Ali, S.H., *Badan Hukum*, cetakan ke-2, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), halaman 31-39.

1. Teori Fiksi (dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny*)

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu hanyalah suatu fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia saja selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2. Teori Orgaan (dipelopori oleh *Otto von Gierke*)

Sebagai reaksi terhadap teori fiksi, maka munculnya teori *Orgaan*. Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, artinya tindakan anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti halnya manusia mengucapkan

kehendaknya dengan perantaraan mulutnya, atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organ) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri.

3. Teori Kekayaan Bersama (dipelopori oleh *Rudolf von Jhering* yang didukung oleh *Molengraaff, Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn*)

Teori Kekayaan bersama, memberikan anggapan bahwa badan hukum adalah sebagai kumpulan manusia, sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.

4. Teori Kenyataan Yuridis (dipelopori oleh *E.M. Meijers*)

Teori Kenyataan Yuridis ini merupakan "penghalusan" (*verfijning*) dari teori orgaan. Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. *Meijers* menyebut teori tersebut dengan teori kenyataan yang sederhana, karena hanya menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Dengan demikian, maka kapan suatu perseroan dapat dikatakan telah berstatus badan hukum ? **Prof. Soekardono, S.H.** menyatakan, bahwa "Dengan *pendaftaran* serta *pengumuman*, pada umumnya sempurnalah segala acara-acara yang harus dipenuhi untuk memeralihkan tanggung jawab terhadap para kreditur perseroan – hanya pada perseroan terbatas saja – sebagai badan hukum". Tetapi pasal 51 KUHD masih mengemukakan sebuah syarat lagi yang harus dipenuhi, agar supaya perseroan terbatas benar-benar dapat memulai kehidupannya sebagai badan hukum dalam dunia perusahaan. Syarat itu adalah adanya penyetoran sedikit-dikitnya sepersepuluh dari modal perseroan ke dalam kas perusahaan. *Ratio* pasal 51 tersebut ialah untuk memberikan jaminan kepada para kreditur perseroan yang adalah sebagai badan hukum, dengan lain perkataan, bahwa badan hukum inilah lalu melulu jadi subjek penagihan/gugatan oleh para kreditur tersebut. Apabila penyetoran itu belum terpenuhi dan perseroan toh mengadakan perjanjian-perjanjian, para penguruslah ikut memikul pertanggungjawabannya sesuai dengan yang diatur dalam dan yang ditafsirkan mengenai pasal 39 KUHD disamping pertanggungjawaban perseroan yang secara yuridis sudah ada".¹⁵ Sehubungan dengan itu, **Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.** menyatakan bahwa, atribut badan hukum itu hanyalah ada manakala undang-undang telah menentukannya demikian, dan undang-undang menentukannya demikian manakala

¹⁵ Soekardono, Prof., S.H., *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian kedua)*, cetakan ke-3, (Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, 1985), halaman 142-143.

dipandang perlu. Untuk hal ini ada dua teknik yang dilakukan oleh para pengundang-undang yakni ; teknik *pertama*, secara tegas undang-undang menyatakan suatu badan adalah badan hukum, sedangkan teknik yang *kedua* adalah dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh ketentuan undang-undang atas sesuatu badan. Kemudian, apabila disimak dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), maka tidak ada satu pasal pun yang menyatakan perseroan terbatas adalah badan hukum, namun dari sifat-sifatnya (karakteristiknya) yang diberikan oleh KUHD, tampaklah bahwa perseroan terbatas itu beratribut badan hukum.¹⁶ Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dari rumusan pasal 7 ayat (6) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapatlah disimpulkan, bahwa untuk dapat berjalan dengan karakteristik sebagai perseroan terbatas, suatu badan memerlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman, yang mana sejak pemerintahan *mantan Presiden K.H. Abdurrachman Wahid*, "sebutan" Menteri Kehakiman diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian diubah lagi menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.¹⁷

Mengenai penegasan tentang status badan hukum perseroan terbatas, **Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama** menyatakan, bahwa "berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), status hukum badan hukum PT yang semula telah secara tegas dinyatakan pada pasal 7 ayat (6) UUPT, namun kemudian menjadi kabur lagi dengan adanya Pasal 23

¹⁶ Rudhi Prasetya, *op cit*, halaman 28.

¹⁷ *Ibid*, halaman 143-144.

UUPT yang mana merupakan pasal yang kurang jelas apa artinya. Memang ini adalah suatu pasal yang ditempatkan di bawah Bab mengenai pendaftaran dan pengumuman, namun dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan". Jadi di sini ada lagi tanggung jawab pribadi dari Direksi, karena walaupun sudah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman atas Akta Pendiriannya, yang dengan demikian perseroan tersebut sudah memiliki status badan hukum, tetapi masih harus dipandang, bahwa untuk semua perbuatan hukum dari perseroan ini terhadap pihak ketiga, Direksilah yang bertanggung jawab sebelum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman tersebut.¹⁸

Teori tentang pertanggungjawaban, Roscoe Pound dalam ajarannya menjelaskan, bahwa pertanggungjawaban hanyalah dapat diakibatkan oleh kelalaian atau – oleh apa yang dianggap – kewajiban. Kehendak perseorangan yang abstrak adalah titik tengah di dalam teori pertanggungjawaban. Jika seseorang sesungguhnya tidak bersalah, karena lalai, namun perintah hukum yang telah ditetapkan dan tidak dapat dibantah, menganggapnya bertanggung jawab, maka ia dianggap bersalah, dan pertanggungjawaban hukum historis yang menjadi bukti kelalaian. Jika sesungguhnya ia tidak memikul suatu kewajiban, namun

¹⁸ Sudargo Gautama, *op cit.*, halaman 47.

perintah hukum yang sudah ditetapkan dan tidak terbantah menganggapnya bertanggung jawab atas kewajiban itu, maka seharusnya begitu, karena ia telah menerima suatu hubungan atau memegang suatu jabatan yang di dalamnya mengandung satu janji mengenai hal itu dipahamkan (*implied*), atau ia telah mengambil bagian dalam suatu situasi yang di dalamnya dipahamkan ada kewajibannya. Demikianlah pemahaman itu merupakan satu deduksi dari pertanggungjawaban.¹⁹

Kemudian perlu dikemukakan, bahwa bagaimanakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang berasal dari suatu badan hukum? Chidir Ali, S.H. menjelaskan, bahwa dalam undang-undang atau anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga dari badan hukum, biasanya ditunjuk siapa yang dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) untuk badan hukum. Perbuatan Badan hukum ini tentu saja hanya dapat dilakukan dengan perantaraan orang, sebab badan hukum hanya suatu pengertian (*begrip*), artinya yang bertindak selalu orang-orang. Menurut pasal 1655 KUH.Perdata dinyatakan, bahwa "Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim,

¹⁹ Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta : Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1982).

baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat". Jadi para pengurus dari badan hukum itu, berwenang untuk bertindak atas nama badan tersebut. Artinya para wakil dari badan hukum yang berbuat untuk badan itu.²⁰ Selanjutnya beliau menjelaskan, bahwa dasar dari kewenangan mewakili itu ialah karena wakil tersebut merupakan *orgaan* dari badan hukum, yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Organ yang demikian ialah : pengurus, direktur, Direksi, komisaris dan dewan komisaris. Oleh karena itu, mereka adalah *orgaan*, sehingga mempunyai kewenangan mewakili.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian thesis ini berfokus pada penelaahan mengenai asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (khususnya ketentuan dalam pasal 23 UUPT), mempunyai beberapa tujuan sebagai-berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tugas, kewajiban serta tanggung jawab pendiri perseroan terbatas atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukan baik untuk dan atas nama maupun tidak untuk dan atas nama perseroan yang belum memperoleh *pengesahan* dari Menteri Kehakiman ;

²⁰ Chidir Ali, S.H., Badan Hukum, *op.cit.*, halaman 185.

2. Untuk mengetahui bagaimana tugas, kewajiban serta tanggung jawab Direksi dan Institusi perseroan terbatas yang telah berstatus badan hukum atau telah memiliki kedudukan mandiri, untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang *belum didaftarkan* dan *diumumkan* sesuai dengan pasal 21 *juncto* pasal 22 UUPT yang dihubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ;
3. Untuk mengetahui bagaimana tugas, kewajiban serta tanggung jawab Direksi perseroan terbatas yang telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan yang *telah didaftarkan* dan *diumumkan* sesuai dengan pasal 21 *juncto* pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang bersifat *monodisipliner*, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan doktrinal atau dogmatis hukum dengan mempergunakan sumber-sumber hukum primer dan didukung dengan data-data sekunder. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum (*rechtsbeginzelen*) dan pengertian-pengertian hukum, yang terdapat dalam peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab pengurus / Direksi perseroan terbatas maupun institusi badan

hukumnya, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Penelitian ini juga dikombinasikan dengan bentuk pendekatan penelitian historis dan komparatif (perbandingan hukum). Dikatakan penelitian historis, karena asas-asas hukum maupun pengertian-pengertian hukum yang dijadikan fokus penelitian ini, akan diperoleh dengan cara analisis induktif yang dimulai dari proses menelaah terhadap premis-premis yang berupa norma hukum, dengan cara menganalisa terhadap pasal-pasal dari salah satu perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847; Nomor 23), dan penelitian komparatif (perbandingan hukum) karena penelitian juga akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Titel 3, Buku II (baru) *Burgerlijk Wetboek* (B.W. Belanda), maupun doktrin-doktrin yang berlaku dalam *Corporate Law* pada sistem *Common Law/Anglo Saxon*, yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam thesis ini termasuk metode deskriptif-analitis, karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berlaku, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dianalisa dalam hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(*Staatsblad* 1847 : 23) serta Buku II (baru) *Burgerlijk Wetboek* (B.W. Belanda) maupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam *Corporate Law* pada sistem *Common Law / Anglo Saxon*, serta dalam hubungannya pada praktik pelaksanaan hukum positif (Yurisprudensi) yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Singkatnya, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan ilmu hukum dalam lapisan doktrinal dan dogmatik hukum, yakni dalam ruang lingkup melakukan interpretasi terhadap hukum positif — tentang tanggung jawab Direksi dan badan hukum perseroan terbatas — yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkrit, yang bertitik tolak pada postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan pada beberapa yurisprudensi dalam praktik-praktik hukum perdata, khususnya hukum perusahaan. Akhirnya diharapkan dalam konsekuensi logisnya berakhir pada penemuan asas-asas normatif dan doktrin-doktrin.

3. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan teoritik ilmu hukum, mengenai tanggung jawab Pendiri, Direksi dan Institusi badan hukum perseroan terbatas atas semua perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseoran, yang dikaitkan

dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Faktor utama yang menentukan tentang terbentuknya badan hukum serta pertanggungjawabannya adalah merupakan suatu kaidah hukum, karena itu, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan proses pembentukan badan hukum dan pertanggungjawabannya tersebut yang dijadikan objek penelitian ini.

Untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian tersebut, maka dilakukan langkah-langkah berikut :

1. melakukan penelusuran kepustakaan secara *primer* yang mencakup peraturan perundang-undangan , yakni meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847 : 23) yang mulai diberlakukan sejak 01 Mei 1848, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mulai diberlakukan sejak 07 Maret 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), dan Buku II (baru) *Burgerlijk Wetboek* (B.W. Belanda) serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah merupakan Yurisprudensi. Secara *sekunder* dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan primer di atas, yakni meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya para ahli hukum (berupa buku-buku literatur), dan secara *tersier* untuk mendapatkan bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

tersebut di atas, misalnya kamus hukum maupun kamus-kamus lainnya.

2. melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran atas teori-teori hukum, yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum dagang, hukum ekonomi serta kebijaksanaan Pemerintah.
3. melakukan pencermatan atas peraturan hukum. Di dalam mencermati peraturan hukum, diperlukan bantuan ajaran interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam rangka memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian asas hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. melakukan analisis secara deskriptif terhadap hukum positif baik yang pernah maupun yang sekarang sedang diberlakukan di Indonesia, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti melalui penalaran teori-teori hukum.
5. melakukan perbandingan hukum, yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan hukum perseroan yang berlaku di negara Belanda – Buku II (baru) *Burgerlijk Wetboek* (B.W. Belanda) – serta doktrin-doktrin yang berlaku dalam *Company Law* pada sistem *Common Law/Anglo Saxon*.

6. Melakukan penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengisian kuisioner oleh para responden atas pelaksanaan atau implementasi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas. Adapun responden yang penulis pilih adalah 10 orang notaris yang bertugas di wilayah hukum kota Pontianak dan 5 buah perusahaan perseroan terbatas yang melakukan kegiatannya di kota maupun kabupaten Pontianak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) khususnya dalam pasal 1 ayat (1) UUPT ini dinyatakan bahwa, "*Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya*".²¹ Dari batasan tersebut di atas, maka unsur-unsur perseroan terbatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum ;
- b. didirikan berdasarkan perjanjian ;
- c. menjalankan usaha tertentu ;
- d. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham ;
- e. memenuhi persyaratan undang-undang.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam subjek hukum, yakni subjek hukum "*pribadi*" (orang-perseorangan), dan subjek hukum berupa "*badan hukum*". Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999, cetakan kedua), halaman 2.

lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.²² Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum *pribadi* dengan subjek hukum berupa *badan hukum* adalah saat *lahirnya* subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat *lahirnya hak-hak* dan *kewajiban-kewajiban* bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang-perseorangan tersebut berada dalam kandungan (pasal 2 ayat (1) KUH.Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, bahwa status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian *disahkan* oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHD yang secara implisit menentukan bahwa

²² Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas – Seri Hukum Bisnis* – cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 7 – 8.

status badan hukum perseroan diperoleh sejak *diumumkan* dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHD penekanannya pada asas *publisitas*, sedangkan UUPT penekanannya pada asas *pengesahannya*.²³ Menurut UUPT, suatu perseroan baru memiliki status sebagai badan hukum jika akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti secara prinsip pemegang saham tidak bertanggung jawab secara *pribadi* atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dalam kepustakaan, sering kali memberikan pengertian bahwa salah satu *syarat* sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak untuk bertindak hukum. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1329 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa, "*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap*". Pasal ini merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa orang adalah *subjek hukum*. Artinya bahwa, pada

²³ *Ibid*, halaman 9.

umumnya atau pada dasarnya setiap orang dapat membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan lain.

Bila pasal 1329 KUH.Perdata adalah dasar hukum yang menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum maka dasar hukum yang menyatakan "badan" apa saja yang merupakan badan hukum adalah pasal 1654 KUH.Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa, *"semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu"*. Demikian KUH.Perdata tidak menerangkan apa saja yang merupakan badan yang sah itu, tetapi hanya menerangkan bahwa perkumpulan atau badan terdiri dari :

- a. perseroan sejati (badan usaha) ;
- b. perhimpunan orang (badan organisasi/sosial) atau perkumpulan atau badan dalam arti sempit.

Sedangkan pasal 1653 KUH.Perdata menyatakan bahwa, semua perkumpulan atau badan akan terbentuk karena :

- a. diadakan atau diakui oleh kekuasaan umum (pemerintah) ;
- b. diperbolehkan atau didirikan untuk sesuatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan perkumpulan atau badan yang sah itu ? Menurut hemat saya, badan yang sah adalah badan yang diadakan atau diakui oleh pemerintah, karena

dengan adanya dasar hukum pendirian tersebut, suatu badan telah dapat melakukan tindakan hukum. Jadi badan yang sah adalah badan usaha maupun badan sosial yang diadakan atau diakui oleh Pemerintah dan badan ini adalah *badan hukum* karena memenuhi unsur pokok suatu subjek hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum.

Suatu badan hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta bertindak dengan perantaraan pengurusnya (Direksi bagi perseroan terbatas), dan pengurus ini harus ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya (pasal 1655 KUH.Perdata). Bila tidak ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya, maka hal itu berarti tiada seorang pun yang dapat mewakili badan hukum tersebut.

Persoalan badan hukum sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan dari para ahli hukum, hal ini karena para ahli hukum ada yang tidak menyadari tentang apakah yang dimaksud dengan badan hukum itu. Kriteria dari suatu badan hukum adalah *kecakapan* atau *kewenangan* badan itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum, bukan modalnya yang tersendiri atau terpisah dari modal pribadinya (misalnya dalam persekutuan firma). Pengertian modal suatu badan hukum secara yuridis adalah modal yang menjadi jaminan atau tanggungan atas perikatan dari badan hukum tersebut. Jadi *modal badan hukum* tidaklah sama dengan *modal pembukuan* badan tersebut, karena modal pembukuan memang terpisah dari

modal pribadi tetapi modal badan hukum adalah modal yang menjadi jaminan atau tanggungan atas perikatan badan hukum tersebut, dan modal ini bukanlah mutlak harus terpisah dari modal pribadi. Harta badan hukum mungkin saja mencakup modal pribadi tergantung bagaimana peraturan atau Anggaran Dasarnya menetapkan, seperti misalnya dalam badan hukum perseroan terbatas yang belum terdaftar dan belum diumumkan maka modal perseroan terbatas itu mencakup modal pribadi Direksi (*vide* pasal 23 UUPT, begitu pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 297/K/SIP/1974).²⁴

3. Saat Mulainya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pasal 6 *junto* pasal 7 ayat (6) UUPT, perseroan terbatas menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Penjelasan pasal 6 UUPT menyatakan bahwa, pada dasarnya jangka waktu berdirinya PT tidak terbatas. Akan tetapi, apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan maka hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam hal Anggaran Dasar tidak menyebutkan jangka waktu berdirinya suatu perseroan terbatas maka PT itu berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tetapi bila dilihat dari pasal 8 dan pasal 12 UUPT yang menentukan bahwa akta pendirian

²⁴ Hardijan Rusli, S.H., *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cetakan pertama, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1996), halaman 24

perseroan terbatas harus memuat Anggaran Dasar dan di dalam Anggaran Dasar harus menyebut jangka waktu berdirinya perseroan terbatas, maka kiranya tidaklah dapat suatu perseroan terbatas tanpa ada jangka waktu berdirinya atau berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas.

Suatu perseroan terbatas secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yaitu berstatus *badan hukum* setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Hal ini berarti bahwa sebelum pengesahan itu, perseroan terbatas tidak ada atau bukan sebagai subjek hukum. Sebelum pengesahan maka suatu perseroan terbatas bukanlah subjek hukum, karena itu perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mengikatkan diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian. Tetapi setelah perseroan terbatas mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman maka sejak saat itu pula perseroan terbatas ada secara hukum sebagai suatu subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau bahasa Inggrisnya *Legal Entity*. Sejak saat perseroan terbatas itu menjadi subjek hukum, barulah perseroan terbatas itu dapat melakukan perbuatan hukum.

4. Pendirian Perseroan Terbatas

Suatu perseroan terbatas dapat didirikan oleh dua orang atau lebih yaitu baik orang pribadi maupun badan hukum, kecuali bagi perseroan terbatas PERSERO yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan

bahwa, pemegang saham harus dua orang tetapi tidak menyebutkan minimum berapa saham paling sedikit harus dimiliki oleh setiap pemegang saham. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pemegang saham boleh memiliki berapa saham saja, bahkan secara hukum seorang pemegang saham boleh hanya memiliki satu saham saja. Setelah perseroan terbatas disahkan lalu pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam hal telah lewat 6 bulan, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan terbatas itu (pasal 7 ayat (1), (3) dan (4) UUPT). Selain itu Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut bila ada pihak yang berkepentingan yang memohonnya. Selanjutnya untuk mendirikan perseroan terbatas, harus memenuhi tata cara atau prosedur sebagai berikut :

- a. membuat akta pendirian dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UUPT) ;
- b. akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman (pasal 7 ayat (6) jo pasal 9 UUPT) ;
- c. akta pendirian beserta surat pengesahan harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (pasal 21 UUPT) ;

d. akta pendirian berserta surat pengesahan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (pasal 22 UUPT).

a. Pembuatan Akta pendirian

Salah satu syarat yang penting peranannya dalam pendirian perseroan terbatas, adalah para pihak harus sama-sama mampu melakukan perbuatan hukum yang dinamakan perjanjian mendirikan perseroan terbatas. Pasal 1 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian. Dengan dimilikinya persyaratan ini bagi kedua belah pihak, maka akan tercipta *bargaining position* yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam menawarkan kehendak satu sama lain untuk dirumuskan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Suatu akta pendirian akan "cacat" secara yuridis apabila segala isinya hanya berdasarkan kehendak salah satu pihak. Makna hakiki suatu perjanjian mendirikan PT terletak pada adanya kemampuan perjanjian dan adanya kebebasan yang tak terbatas untuk melakukan tawar-menawar segala hal yang ingin mereka rumuskan dalam akta pendirian.²⁵

Seperti telah dijelaskan secara singkat di muka bahwa, suatu perseroan terbatas didirikan dengan perjanjian antara dua atau

²⁵ Anisitus Amanat, S.H., C.N., *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, cetakan pertama, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), halaman 22 – 23.

lebih pihak sebagai pendiri perseroan, yang dipertegas kembali oleh rumusan pasal 7 ayat (1) UUPT. Penjelasan pasal ini secara tegas juga menekankan kembali bahwa "*..... pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian*". Karenanya, dengan mengacu pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata ²⁶ yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", dan pasal 1338 ayat (2) KUH.Perdata yang menyatakan bahwa "*perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan dari para pihak yang membuatnya, atau karena alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang*", maka dapat dikatakan bahwa akta pendirian perseroan (hanya) mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, baik untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, maupun segala sesuatu yang menurut sifatnya diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Akta pendirian tersebut mengatur segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya, yaitu para pendiri perseroan terbatas tersebut ²⁷.

Rumusan pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa akta pendirian perseroan memuat Anggaran Dasar perseroan secara

²⁶ R. Subekti, Prof., S.H., dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi revisi, cetakan ketiga-puluh, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999), halaman 342.

²⁷ Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, halaman 28 – 29

keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang diperlukan, seperti :

1. identitas para pendiri perseroan ;
2. identitas para pengurus (Direksi), dan pengawas (Komisaris) perseroan ;
3. keterangan mengenai para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian suatu perseroan terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum perseroan terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengesahan diberikan *terhadap* akta pendirian perseroan terbatas, sedangkan dalam UUPT – melalui Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang *tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas* – pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, yang ditandatangani dan disampaikan secara langsung oleh para pendiri perseroan, yang

diketahui oleh notaris, dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat. Adapun akta pendirian harus dilampirkan bersama-sama dengan berbagai lampiran pendukung lainnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Satu hal yang boleh dikatakan cukup penting di sini adalah bahwa Keputusan Menteri Kehakiman ini menekankan pada pentingnya peran notaris dalam proses pengajuan akta pendirian ini ²⁸.

Dalam hal permohonan pengesahan ditolak maka penolakan itu harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya. Pengesahan maupun penolakan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPT). Ketentuan dalam waktu paling lama enam puluh hari adalah waktu untuk memberikan pengesahan atau penolakan dan bukan waktu terjadinya pengesahan. Karena itu dalam waktu enam puluh hari itu telah berlalu tanpa ada pemberian pengesahan atau penolakan, hal ini tidak menjadikan perseroan terbatas yang dimintakan pengesahannya itu *otomatis* menjadi sah atau menjadi badan hukum.

²⁸ *Ibid.*, halaman 22.

c. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan

Akta Pendirian dan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan (pasal 21 UUPT). Daftar Perusahaan yang dimaksud di atas adalah daftar catatan resmi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Kalau dahulu menurut pasal 38 KUHD, pendaftaran dilakukan di Panitera Pengadilan Negeri, tetapi sekarang menurut UUPT dilakukan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak, hal ini berarti bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi dan setiap orang yang berkepentingan berhak memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan (pasal 3 dan 4 UU Nomor 3 Tahun 1982).

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1982, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya atau mulai diterimanya ijin usaha. Tetapi menurut UUPT, pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan atau setelah persetujuan atau penerimaan laporan bagi perubahan Anggaran Dasar tertentu. Mengingat UUPT adalah undang-undang yang lebih baru dan

merupakan undang-undang khusus bagi perseroan terbatas, maka jelas ketentuan waktu pendaftaran bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah mengikuti ketentuan dalam UUPT, yaitu dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan atau persetujuan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan yang berbunyi :

*"ketentuan yang khusus meniadakan ketentuan yang umum" dan "ketentuan yang dibuat kemudian meniadakan ketentuan yang terdahulu".*²⁹

Menurut ketentuan pasal 21 UUPT, kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi perseroan. Adapun yang wajib didaftarkan adalah :

1. akta pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Kehakiman ;
2. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan persetujuannya ;
3. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan-perubahan yang disyaratkan pelaporannya kepada Menteri.

Pendaftaran akta pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah

²⁹ Hardijan Rusli, S.H., *op.cit.*, halaman 58.

pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang permohonan pengumumannya dilakukan oleh Direksi dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 22 UUPT). Maksud diadakan pengumuman tidak lain agar dapat diketahui oleh masyarakat. Karena sifat pendaftaran adalah terbuka, maka setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi daftar perusahaan setelah membayar biayanya yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu, terhadap pengumuman tersebut, kepada pihak ketiga yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1982). Keberatan itu diajukan secara tertulis diajukan secara tertulis ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan disertai alasan-alasannya.

Tujuan diajukannya keberatan, adalah agar pendaftaran perusahaan yang bersangkutan dihapuskan dari daftar perusahaan. Keputusan tentang keberatan ini berada di tangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan setelah mendengar para

pihak, yaitu pihak yang mengajukan keberatan, pihak pengusaha dan Kantor Pendaftaran Perusahaan. Atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, sudah tentu ada pihak yang tidak puas, upaya hukum apakah yang dapat ditempuh? Upaya hukum tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, bahwa pengusaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Tidak dijelaskan oleh undang-undang tentang bagaimana bentuk keberatan itu, apakah bentuknya sama dengan gugatan? Kemudian yang menjadi persoalan lagi, apakah hanya pihak pengusaha saja yang dapat menempuh upaya hukum tersebut? Bagaimana pula dengan pihak ketiga dan Kantor Pendaftaran Perusahaan?³⁰

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, keberatan di atas dapat menjadi persoalan, sebab akan timbul pertanyaan, apakah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang berisi keputusan tentang keberatan pendaftaran perusahaan adalah tergolong sebagai keputusan tata usaha negara? Kalau demikian halnya, akan merupakan salah satu titik singgung antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab satu perkara

³⁰ Gatot Supramono, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, cetakan kedua – edisi revisi, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999), halaman 31 – 32.

terdapat kemungkinan untuk diadili oleh kedua Peradilan tersebut. Dari sini dapat dijawab pertanyaan di atas, bahwa pihak ketiga dan pihak kantor pendaftaran perusahaan yang tertutup untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri dapat menggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi terjadi suatu perkara seperti itu diajukan ke Pengadilan Negeri dan diajukan pula ke Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Hakim yang mengadili harus menunda salah satu (Pengadilan Negeri atau Peradilan Tata Usaha Negara) supaya tidak terjadi putusan yang tumpang tindih, sehingga akan mengakibatkan ketidakadilan yang merugikan pencari keadilan.³¹

5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Dari uraian pasal 8 ayat (1) UUPT, dinyatakan bahwa, Anggaran Dasar perseroan merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Komisaris) perseroan. Kenyataan bahwa Anggaran Dasar merupakan aturan main dalam perseroan diperkuat oleh ketentuan pasal 4 UUPT yang menyatakan : *"Terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan*

³¹ Ibid, halaman 32.

perundang-undangan lainnya", termasuk di dalamnya asas itikad baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.

Sebelum akta pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut. Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi "Undang-Undang" bagi semua pihak, termasuk bagi para pembuatnya. Walau demikian, secara hirarkis Anggaran Dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya. Demikian rumusan pasal 125 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa, "*Akta pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini*". Dengan demikian, secara implisit akan membatalkan setiap ketentuan dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini berarti Anggaran Dasar merupakan aturan main perseroan, yang tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga lainnya yang berhubungan

hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, pengurus (Direksi) dan Komisaris perseroan.³²

Pada pasal 12 UUPT ditentukan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

1. nama dan tempat kedudukan perseroan ;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. jangka waktu berdirinya perseroan ;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor ;
5. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham ;
6. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris ;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS ;
8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris ;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen ; dan
10. ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan perseroan, di dalam Anggaran Dasar perlu dirumuskan secara tegas bahwa perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (pasal 2 UUPT). Rumusan kegiatan itu adalah usaha yang dijalankan oleh perseroan, tegas tetapi cukup luas cakupannya,

³² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op cit*, halaman 30.

misalnya perseroan bertujuan menjalankan usaha di bidang pembangunan pemukiman (*real estate*), dalam usaha ini termasuk juga pembangunan wilayah, pembangunan gedung, pembangunan sarana dan prasarana, dan penataan lingkungan. Misal lain, perseroan bertujuan menjalankan usaha perdagangan barang elektronik, dalam usaha ini termasuk juga perdagangan televisi, radio, lemari es, penyejuk ruangan, *tape recorder*, *laser disc player*, dan seterusnya.³³

Ketentuan usaha tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, misalnya tidak memperdagangkan barang hasil penyelundupan, hasil perampokan dan pencurian, tidak dilindungi oleh dokumen yang sah. Sedangkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya menjalankan usaha penyaluran tenaga kerja wanita, tetapi tidak lebih daripada penyaluran wanita untuk dijadikan pelacur. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, misalnya menjalankan usaha panti pijat, tetapi sebenarnya pelacuran terselubung.³⁴

Setelah mengetahui tentang isi minimal akta pendirian dalam pasal 8 ayat (1) UUPT dan isi Anggaran Dasar dalam pasal 12 UUPT, maka timbul pertanyaan apakah Anggaran Dasar perseroan dapat dibuat dengan akta tersendiri? Melihat isi minimal (sekurang-kurangnya) dengan rincian dalam pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c)

³³ Abdulkadir Muhammad, Prof., S.H., *Hukum Perseroan Indonesia*, cetakan ke-1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 23.

³⁴ *Ibid*

UUPT, maka Anggaran Dasar dapat dibuat dengan akta tersendiri sebagaimana pasal 12 UUPT. Meskipun Anggaran Dasar dapat dibuat terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan dalam akta pendirian. Oleh karena itu dalam mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian, Anggaran Dasar yang dibuat dengan akta terpisah tidak boleh ketinggalan, sebab dapat berakibat permohonan itu akan ditolak Menteri Kehakiman.³⁵

6. Pembubaran atau Hapusnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Suatu persoalan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya selalu berhubungan dengan pihak ketiga seperti melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan sebagainya. Apabila kewajiban dalam transaksi tersebut masih ada misalnya belum dibayar atau masih ada kekurangan pembayaran namun perseroan mengalami pembubaran, maka bubarnya perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang kedudukannya sebagai kreditur. Hal ini dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1339 ayat (3) KUH.Perdata tentang itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu perseroan yang bubar tetap berkewajiban memenuhi pembayaran terhadap pihak kreditur. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut dilakukan dengan cara likuidasi sebagaimana

³⁵ Gatot Supramono, S.H., *op cit*, halaman 16.

dimaksud dalam pasal 115 ayat (4), pasal 116 ayat (5) dan pasal 117 ayat (2) UUPT.

Adapun yang dimaksud dengan likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Dalam pasal 124 ayat (2) UUPT dengan tegas disebutkan, sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham. Dengan bubarnya perseroan, maka mengakibatkan bahwa Direksi sejak saat itu tidak berwenang melakukan perbuatan hukum lagi seperti mengadakan transaksi tersebut di atas, dan perbuatan hukum dalam rangka likuidasi tersebut dilakukan oleh likuidator. Sedangkan pertanggungjawaban likuidator sesuai dengan pasal 124 ayat (1) UUPT diberikan kepada RUPS.³⁶

Selanjutnya, status badan hukum perseroan menjadi hapus bila suatu perseroan bubar. Menurut pasal 114 UUPT, Suatu perseroan dapat bubar atau tidak menjadi badan hukum lagi, dikarenakan oleh :

1. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
2. jangka waktu berdirinya berakhir ;
3. penetapan Pengadilan.

Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat 2 KUHD yang secara jelas menyatakan bahwa kerugian perusahaan hingga tujuh puluh lima persen dari modal akan membawa akibat bubar demi hukumnya

³⁶ *Ibid*, halaman 101 – 102.

perseroan tersebut, sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Kepailitan menentukan sebaliknya, bahwa kepailitan tidak mengakibatkan bubarnya perseroan, selama harta kekayaan perseroan setelah kepailitan berakhir masih ada dan dapat dipergunakan untuk menjalankan perusahaan.

Perseroan tidak menjadi badan hukum lagi bersamaan dengan bubarnya perseroan dan sejak saat itu berarti perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi atau pemberesan (lihat pasal 119 ayat (1) UUPT). Tetapi pasal 118 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga selama pembubaran itu belum didaftarkan dan diumumkan.

Apakah yang dimaksud dengan tidak berlaku bagi pihak ketiga? Apakah berarti bahwa perseroan belum bubar bagi pihak ketiga? Lalu apakah artinya secara hukum perseroan telah bubar tetapi bagi pihak ketiga perseroan tersebut belum bubar? Siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga? Siapa pula yang dimaksud dengan pihak pertama maupun pihak kedua? Kiranya hal ini harus dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan dari UUPT atau bila memungkinkan dibuat suatu undang-undang baru lagi yang mengubah pasal 118 UUPT. Dalam peraturan perseroan yang lama yaitu KUHD, secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal perseroan terbatas mengalami kerugian sebesar lima puluh persen, maka kerugian ini harus didaftarkan di

Panitera Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara, serta bila kerugian itu mencapai tujuh puluh lima persen, maka demi hukum perseroan terbatas tersebut bubar dan sejak saat itu pula maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung renteng atas segala perikatan yang masih dilakukannya (pasal 47 KUHD).³⁷

Kemungkinan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar perseroan yaitu subjek hukum siapa saja yang berhubungan dengan perseroan terbatas itu. Lalu arti bubarnya perseroan terbatas tidak berlaku bagi pihak ketiga mungkin – karena UUPT tidak menjelaskan, jadi tidak dapat dipastikan artinya – adalah segala perbuatan yang dilakukan pihak ketiga atau pihak luar terhadap perseroan terbatas masih dianggap sah selama perbuatan itu hanya berupa pengurusan, bukan membuat perikatan tetapi terbatas menjalankan perikatan yang telah dibuat sebelum perseroan terbatas bubar, atau kehilangan status badan hukumnya. Karena bila perbuatan pihak ketiga merupakan perbuatan hukum (perikatan) dengan perseroan terbatas yang telah bubar itu maka perikatan tersebut tidak sah, sehubungan perseroan terbatas itu telah menjadi tidak cakap karena bukan badan hukum lagi, sehingga perikatan itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satu pihaknya tidak cakap (lihat pasal 1320 KUH.Perdata). Berdasarkan hal

³⁷ Hardijan Rusli, S.H., *op cit*, halaman 46.

tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bubarnya perseroan terbatas tidak berlaku bagi pihak ketiga hanyalah untuk perbuatan pengelolaan saja, bukan yang berupa pengikatan.³⁸

B. KEKUASAAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UUPT, organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perseorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perseorangan, seperti yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-

³⁸ *Ibid*

Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari buku kedua Kitab Undang-Undang Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.³⁹

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. Kekuasaan dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat yang dimaksud adalah terletak dalam wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 63 *juncto* 64 UUPT).

Wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain ditetapkan di dalam UUPT

³⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op cit*, halaman 77.

dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan atau disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.⁴⁰

Jadi Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS menurut UUPT mempunyai kekuasaan dan wewenang, yaitu :

1. kekuasaan tertinggi dalam perseroan ; dan
2. wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Sedangkan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, adalah :

- a. mengubah Anggaran Dasar (pasal 14) ;
- b. membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada organ lain dalam hal ini kepada Direksi atau Komisaris (pasal 31 dan 32) ;
- c. menambah modal perseroan kecuali RUPS menyerahkannya kepada Komisaris (pasal 34) ;
- d. mengurangi modal perseroan (pasal 37) ;
- e. memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan (pasal 60) ;
- f. menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (pasal 62) ;

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Prof., S.H., *op cit*, halaman 65 – 66.

- g. memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris (pasal 63) ;
- h. mengangkat anggota Direksi (pasal 80) ;
- i. menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi, kecuali dilimpahkan kepada Komisaris (pasal 81) ;
- j. memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan terbatas (pasal 88) ;
- k. memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri (pasal 90) ;
- l. memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya (pasal 91) ;
- m. memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya – hak ini juga dimiliki oleh Komisaris – (pasal 92) ;
- n. mengangkat Komisaris (pasal 95) ;
- o. memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara (pasal 101) ;
- p. menyetujui rancangan penggabungan atau peleburan (pasal 102) ;
- q. memberikan persetujuan pengambilalihan (pasal 103) ;
- r. memberikan keputusan pembubaran perseroan (pasal 115) ;
- s. menerima pertanggungjawaban Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya (pasal 124).

b. Penyelenggaraan dan Sistem Pengambilan Keputusan dalam RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. RUPS diselenggarakan oleh Direksi. RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya (pasal 65 *juncto* 66 UUPT). Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan ijin kepada pemohon untuk :

1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan ; atau
2. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) UUPT, apabila Direksi atau

Komisaris setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan, tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya (pasal 67 ayat (1) UUPT).

Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan atau Anggaran Dasar. Apabila RUPS tersebut diselenggarakan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin kepada pemohon merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir (pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) UUPT).

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya Direksi berhalangan atau pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Untuk mengadakan RUPS, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau dalam dua surat kabar harian. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan (pasal 68 *juncto* 69 UUPT).

Keputusan RUPS adalah sah, bila syarat penyelenggaraan RUPS telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan korum serta jumlah pemegang saham yang menyetujui sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan UUPT. Ketentuan tentang korum dan jumlah pemegang saham yang harus menyetujui keputusan RUPS menurut UUPT adalah sebagai berikut :

Pertama, RUPS dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari separuh atau lebih dari 50 % dari jumlah seluruh saham dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (pasal 73 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 74 ayat (1) UUPT).

Untuk hal-hal tertentu, besarnya korum diatur sebagai berikut :

1. Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar, korum menjadi sah bila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh saham dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara tersebut (pasal 73 dan pasal 75 UUPT) ;
2. Khusus untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan terbatas, korum menjadi sah bila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut (pasal 76 UUPT).

Walaupun pasal 76 UUPT telah menentukan korum untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan

pembubaran perseroan terbatas tetapi dalam pasal 105 UUPT dan pasal 115 UUPT ditentukan bahwa ketentuan korum untuk hal tersebut selain menurut pasal 76 UUPT, juga menurut pasal 74 ayat (1) UUPT yaitu harus melalui musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam RUPS pertama untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran, korum yang harus dicapai adalah bila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dan disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Baru bila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat itu, keputusan menjadi sah bila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah tersebut. Masalahnya apakah persetujuan oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut harus dapat diambil dalam RUPS pertama itu juga atau harus diambil dalam RUPS yang kedua kali? Kiranya juga peraturan pelaksanaan UUPT dapat menjelaskan hal ini.⁴¹

Kedua, dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum maka diadakan pemanggilan kedua yang harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama. Korum RUPS kedua ialah diwakili oleh pemegang saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari

⁴¹ Hardijan Rusli, S.H., *op cit*, halaman 120.

jumlah seluruh saham dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kecuali Anggaran Dasar atau UUPT menentukan lain.

1. khusus untuk mengubah Anggaran Dasar, korum menjadi sah bila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh saham dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (pasal 75 ayat (2) UUPT) ;
2. khusus untuk penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, kepailitan dan pembubaran, maka bila keputusan tidak tercapai secara musyawarah mufakat, maka keputusan menjadi sah bila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.

Ketiga, dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai maka korum untuk RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan perseroan terbatas (pasal 73 angka 6 UUPT).

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan *cara lain* dari rapat. Apabila Anggaran Dasar mengatur ketentuan tersebut, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil (pasal 78 UUPT). Pengambilan keputusan RUPS dengan "cara lain" adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua

pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.⁴²

2. Direksi Perseroan

Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi mewakili perseroan. Jadi Direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Lalu siapakah yang dapat bertindak sebagai Direksi? Direksi adalah merupakan dewan Direktur (*boards of directors*) yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri dari beberapa anggota Direksi yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa Direktur. Bila Direksi hanya satu orang direktur saja, maka persoalan siapa yang mewakili Direksi jelas adalah direktur tersebut, tetapi bagaimana bila Direksi itu terdiri dari beberapa orang direktur?. Hal ini tergantung dari apa yang ditentukan dalam

⁴² Abdulkadir Muhammad, Prof., S.H., *op cit*, halaman 72.

Anggaran Dasar. Karena itu, bila ingin mengetahui siapakah yang dapat mewakili Direksi, maka dapat dicari dalam Anggaran Dasar perseroan. Anggaran Dasar mungkin menentukan bahwa yang dapat mewakili atau bertindak sebagai Direksi adalah masing-masing anggota Direksi atau mungkin pula ditetapkan yang dapat mewakili Direksi adalah masing-masing anggota Direksi dengan Presiden Direkturnya (dua orang).

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan siapakah yang dapat mewakili perseroan, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi (pasal 83 ayat (1) UUPT). Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 89 UUPT).

a. Kekuasaan dan Wewenang Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pada prinsipnya Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan

perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip "*fiduciary duty*" yang mencakup juga "*duty of skill and care*" oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi, dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan Direksi, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota Direksi.⁴³

Menurut ketentuan pasal 79 ayat (1) UUPT, kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi (pasal 79 ayat (2) UUPT). Hal ini perlu, mengingat beratnya tugas dan tanggung

⁴³ *Ibid*, halaman 72.

jawab Direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi.⁴⁴

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali anggota Direksi diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam akta pendirian dan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali (pasal 80 UUPT).

Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS yang disebutkan tadi dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS (pasal 81 UUPT). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan (pasal 82 UUPT).

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar (pasal 83 UUPT). Undang-Undang Perseroan Terbatas memilih sistem perwakilan kolegal, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Dalam anggaran

⁴⁴ *Ibid*, halaman 73.

dasar dapat juga ditentukan pembatasan wewenang anggota Direksi. Pembatasan wewenang tersebut diberikan karena ada perbedaan kepentingan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 84 UUPT menentukan mengenai hal pembatasan wewenang Direksi. Menurut ketentuan pasal ini, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

1. terjadi perkara di Pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ;
2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Demikian, maka dalam Anggaran Dasar ditetapkan, yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan seperti yang ditentukan dalam butir (1) dan (2) di atas, maka RUPS harus mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam menggugat Direksi yang merugikan perseroan di muka Pengadilan.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Atas nama perseroan, pemegang

saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 85 UUPT). Selain itu, Direksi juga wajib :

1. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi ; dan
2. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Daftar pemegang saham, risalah rapat, dan pembukuan tersebut disimpan di tempat kedudukan perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar Pemegang Saham, risalah rapat, dan pembukuan perseroan (pasal 86 UUPT).⁴⁵

Anggota Direksi juga wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau anggota keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (pasal 87 UUPT). Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus. Demikian juga mengenai kepemilikan saham anggota keluarga beserta perubahannya wajib dilaporkan. Yang dimaksud "keluarga" adalah suami / istri dan anak-anaknya.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 75 – 76.

Mengenai harta kekayaan perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Perbuatan hukum pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan itu diumumkan dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan (pasal 88 UUPT).

Syarat memperoleh persetujuan RUPS dalam hal pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, kemungkinan sulit dipenuhi oleh perseroan *go public* yang menerbitkan obligasi atau obligasi konversi. Alasannya ialah kemungkinan sebagian atau seluruh kekayaannya dijadikan jaminan. Hal ini wajar, karena perseroan *go public* menghimpun dana dari masyarakat pemegang obligasi.

Mengenai kepailitan perseroan, Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Namun anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (pasal 90 UUPT).

Ketentuan pasal 90 UUPT ada kesamaannya dengan ketentuan pasal 47 KUHD, yaitu kesamaan mengenai tanggung jawab pribadi Direksi secara tanggung renteng (*personal liability*) dalam hal perseroan menderita kerugian karena kesalahan Direksi, sedangkan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kerugian itu. Tetapi antara kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu :

1. Pasal 47 KUHD menetapkan secara tegas batas kerugian mencapai 75 % dari modal dasar, demi hukum perseroan bubar dan perbuatan Direksi setelah perseroan bubar adalah perbuatan pribadi, akibatnya dia bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng terhadap para kreditur ;
2. Pasal 90 UUPT tidak menetapkan batas kerugian, dan kepailitan tidak demi hukum membuat perseroan bubar, kecuali jika dimohonkan kepada dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Direksi bertanggung jawab pribadi

secara tanggung renteng terhadap para kreditur dalam hal kekayaan perseroan tidak mencukupi.

3. Komisaris Perseroan Terbatas

Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Berbeda dengan KUHD, maka dalam UUPT diharuskan memiliki Komisaris. Bahkan untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan merupakan Perseroan Terbuka, diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang Komisaris, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar.

Apabila lebih dari satu orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Namun berbeda dengan Direksi, maka sebagai majelis, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Kata "Komisaris" di sini mengandung dua pengertian yaitu baik sebagai organ, yaitu dewan Komisaris maupun sebagai orang perseorangan yaitu anggota Komisaris. Sebagai organ, dalam UUPT ini pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam akta pendirian. Komisaris diangkat untuk

jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, demikian pasal 94 – 95 UUPT. Sama halnya dengan Direksi, yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang :

1. mampu melakukan perbuatan hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit ; atau
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ; atau
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. (pasal 96 UUPT).

a. Kekuasaan dan Wewenang Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Selaku pengawas dan penasehat Direksi, Komisaris berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi (pasal 100 UUPT). Komisaris juga berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi (pasal 92 UUPT).

Untuk mengefektifkan fungsi Komisaris, maka ditetapkan pula persyaratan untuk menjadi Komisaris adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi Direksi. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi berlaku pula terhadap Komisaris terutama apabila dia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal tertentu. Dalam hal tertentu itu misalnya Direksi diberhentikan oleh RUPS sebelum jabatannya berakhir, atau Direksi berhalangan sementara melakukan tugas pengurusan dengan alasan tertentu.

Perseroan memiliki Komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (pasal 94 ayat (1) UUPT). Perkataan "Komisaris" mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang-perseorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim juga disebut "dewan Komisaris", sedangkan orang perseorangan disebut "anggota Komisaris". Sebagai organ dalam UUPT, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus bidang tertentu.

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau Perseroan Terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang Komisaris (pasal 94 ayat (2) UUPT). Untuk perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana

masyarakat diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu dibutuhkan lebih dari satu Komisaris. Apabila terdapat lebih dari satu Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis (pasal 94 ayat (3) UUPT). Berbeda dengan Direksi, dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris, maka sebagai majelis Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Komisaris

Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 98 UUPT).

Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (pasal 99 UUPT). Setiap perubahan dalam kepemilikan saham wajib pula dilaporkan. Laporan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam *daftar khusus*. Demikian pula perubahan dalam kepemilikan saham anggota

keluarga wajib dilaporkan. Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah istri / suami dan anak-anaknya.

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (pasal 100 ayat (1) dan (2) UUPT). Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam UUPT.

Tetapi bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu diberi wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (pasal 100 ayat (3) UUPT). Keadaan tertentu ini misalnya Direksi berhalangan sementara, pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan. Dalam hal ini fungsi Direksi digantikan oleh Komisaris. Dengan demikian, ketentuan yang

berlaku bagi Direksi berlaku pula bagi Komisaris yang menjalankan fungsi Direksi.

C. TANGGUNG JAWAB DIREKSI dan BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

1. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai suatu *badan hukum*, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas melaksanakan kegiatannya melalui organ-organ yang dimilikinya, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Sebagai organ perseroan terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi melakukan kepengurusan atas perseroan terbatas, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusannya terhadap perseroan tersebut, Direksi

tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

a. Tanggung Jawab Intern

1) Tanggung Jawab Kepada Perseroan

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPT dan pasal 22 ayat (1) UUPT. Ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) UUPT tersebut mewajibkan Direksi perseroan untuk mendaftarkan akta pendirian atau Anggaran Dasar perseroan – *dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Kehakiman – beserta surat pengesahannya – dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman –* dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selanjutnya pasal 22 ayat 1 UUPT menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau Anggaran Dasar perseroan *(dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui)*

oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh anggota Direksi perseroan atas setiap perbuatan hukum perseroan.⁴⁶

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam hal menjalankan perseroan, Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam perseroan, yang harus disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pengecualian atas pemakaian standar akuntansi keuangan tersebut hanya dimungkinkan jika ada alasan yang kuat untuk itu, dan karenanya harus disebutkan dalam penyusunan laporan keuangan berkenaan. Pembukuan ini akan menjadikan bukti atas setiap transaksi keuangan perseroan selama satu tahun buku berjalan, yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Direksi. Perseroan bersamaan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban atas laporan tahunan dalam RUPS tahunan.

Selain menyelenggarakan RUPS tahunan, Direksi juga diwajibkan untuk mengadakan RUPS luar biasa atas permintaan dari satu atau lebih pemegang saham perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya sepuluh persen dari seluruh jumlah saham

⁴⁶ Ahmad Yani dan Gunanwan Widjaja, *op cit*, halaman 105.

yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Risalah-risalah RUPS maupun RUPS luar biasa ini, berikut risalah-risalah rapat Direksi dan atau Komisaris perseroan wajib disimpan dalam suatu tempat yang terbuka dan yang memudahkan bagi setiap pemegang saham untuk memeriksa dan melihatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direksi tidak luput dari pengawasan Komisaris (pasal 97 UUPT). Maksudnya agar Direksi dalam menjalankan tugasnya selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh perseroan, karena bagaimanapun juga pengurusan perseroan dilakukan adalah untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

2) Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham Perseroan

Setelah perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka selain timbul tugas dan tanggung jawab Direksi kepada perseroan, tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada pemegang saham perseroan. Seiring dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Direksi kepada perseroan, juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara :

Pertama, daftar pemegang saham, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham. Daftar pemegang saham memuat segala macam informasi yang ada mengenai kepemilikan saham dalam perseroan, pengalihan hak maupun penjaminan yang mungkin

diberikan atas saham-saham tersebut. Daftar tersebut harus dipelihara oleh Direksi dan menjadi dasar untuk setiap pemanggilan terhadap pemegang saham perseroan untuk RUPS, maupun dalam rangka pengalihan dan penjaminan dalam kaitannya dengan status kepemilikan, penguasaan dan hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat, hak untuk menerima deviden dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga ;

Kedua, daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris perseroan, beserta keluarganya, atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya.

b. Tanggung Jawab Ektern (Kepada Pihak Ketiga)

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain termuat dalam :

1. pasal 38 ayat (2) UUPT, dalam hal perseroan ingin melakukan pengurangan atas modal dasar, modal dikeluarkan ataupun modal disetor dari perseroan ;

2. pasal 105 ayat (2) UUP, dalam hal perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ;
3. dan bagi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang, dan dalam bentuk perseroan terbuka. Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik sebelum perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh RUPS. Selanjutnya segera setelah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga. Khusus untuk PT Terbuka, Direksi perseroan juga diwajibkan untuk mengumumkan setiap maksud dan rencana penyelenggaraan RUPS.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan pada perjanjian antara para pihak. Dalam hal-hal yang demikian tersebut di atas, Direksi berkewajiban untuk memberikan data dan atau keterangan tersebut secara benar dan akurat.⁴⁷

1) Hal Pemberian Keterangan yang Tidak Benar

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada

⁴⁷ *Ibid*, halaman 114 –115.

publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut; kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

Selain kewajiban yang dibebankan dalam ketentuan pasal 60 ayat (3) UUPT, yang mewajibkan Direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga; pasal 90 ayat (2) UUPT juga memberikan tanggung jawab personal pada Direksi perseroan atas terjadinya kepailitan yang disebabkan oleh karena kesalahan dan atau kelalaian Direksi.

2) Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (*Acquit de Charge*)

Dalam setiap RUPS Tahunan, selalu dapat ditemui adanya pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) oleh pemegang saham kepada Direksi perseroan atas setiap kegiatan perseroan dalam tahun buku yang baru lampau, sepanjang kegiatan tersebut dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam RUPS Tahunan tersebut. Ketentuan ini seringkali disalahartikan bahwa dengan diberikan-

nya *acquit de charge* tersebut, Direksi telah bebas dari segala pertanggungjawaban yang mungkin masih harus ditanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana telah diberikan *acquit de charge* tersebut. Oleh sebab itu perlu dijelaskan di sini bahwa pada prinsipnya pemberian *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam RUPS tahunan. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan berkenaan, Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya. Satu hal perlu dicatat juga bahwa *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh para pemegang saham, sedangkan untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan *pidana* sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah diberikan *acquit de charge*. Ini berarti Direksi tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan. Semua ketentuan mengenai daluwarsa berlaku dalam hal ini.⁴⁸

Dalam hal ini **Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.**, menjelaskan bahwa, dari perbuatan yang telah dilakukan pengurus itu timbul

⁴⁸ *Ibid*, halaman 116.

dua dampak. Dampak yang *pertama* adalah dalam hubungan dengan pihak luar yaitu pihak ketiga. Sepanjang dalam hubungan dengan pihak ketiga memang *a priori* berlaku ketentuan pasal itu. Artinya dari perbuatan itu semata-mata menimbulkan hubungan hukum dengan "pihak perseroan" dengan harta kekayaan perseroan semata-mata sebagai pertanggungjawabannya. Dampak yang *kedua* adalah dalam hubungannya secara "intern" dalam tubuh perseroan sendiri. Maksudnya adalah hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya yaitu institusi "Komisaris" dan atau "Rapat Umum Pemegang Saham". Dalam hubungan ini, menurut beliau harus berhati-hati, sebab dengan pengurus telah menjalankan tugasnya tanpa menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar, belum tentu pengurus sudah *a priori* kebal terhadap tanggung jawabnya. Masalahnya, dalam hubungan ini dilihat dalam scope yang lebih luas, yaitu pertanggungjawaban ini jangan sekedar dilihat dalam bingkai juridis formal saja. Namun hendaknya diperhitungkan pula segi "kebijaksanaan ekonomis" dan "policy lainnya" berdasarkan "kepatutan" atas tindakan yang dijalankan pengurus dalam rangka memimpin dan menjalankan roda kegiatan usaha perusahaan.⁴⁹

⁴⁹ Rudhi Prasetya, Prof., Dr., S.H., *op cit*, halaman 205.

2. Tanggung Jawab Renteng Direksi Perseroan Terbatas

a. Tanggung Jawab Sebelum Perseroan Disahkan

Sebagaimana diketahui bahwa *sebelum* akta pendirian perseroan mendapat pengesahan Menteri Kehakiman, maka yang bertanggung jawab dalam perseroan adalah pendiri / pemegang saham. Mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tanggung jawab sampai melebihi nilai saham yang diambarnya.

Kembali pada uraian awal dimana dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum. Status badan hukum dari perseroan terbatas diperoleh pada saat akta pendirian dari perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman. Terhitung sejak saat pengesahan, para pendiri perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara *tidak terbatas* atas tiap perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, dan hanya akan menanggung kerugian yang terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) UUPT. Selama pengesahan tersebut belum diperoleh, maka para pendiri (dan sekaligus pengurusnya) bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Ketiadaan pengesahan itu tidak meniadakan

perseroan yang hendak dibentuk, hanya saja sifat pertanggungjawabannya yang belum tidak terbatas. Berdasarkan pada sifat pertanggungjawaban renteng tersebut, oleh kalangan ahli hukum, status hukum dari perseroan terbatas dalam pendirian diperlukan sama dengan atau sebagaimana layaknya suatu persekutuan dengan firma, dimana para pengurus bertindak selaku kuasa dari para pendiri dalam menjalankan kegiatan atau usaha perseroan. Dengan ini berarti bahwa selama harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban perseroan (dalam pendirian) tersebut, maka para pendiri (dan pengurus) bertanggung jawab secara pribadi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang belum terlunasi.⁵⁰

b. Tanggung Jawab Setelah Perseroan Disahkan Tetapi Belum Didaftarkan dan Diumumkan

Berbeda dengan perseroan yang telah mendapat pengesahan tetapi belum dilakukan pendaftaran perusahaan dan pengumuman. Pasal 23 UUPT menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman itu belum dilaksanakan, maka Direksi secara *tanggung renteng* bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

⁵⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op cit*, halaman 112.

Dibandingkan dengan KUHD tidak demikian halnya, bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah *orang demi orang* dan *masing-masing* bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga (pasal 39 KUHD). Jadi pengurus perseroan terbatas dalam hal ini Direksi masing-masing bertanggungjawab secara **pribadi** atas perbuatan hukum atas nama perseroan.

Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pasal 23 UUPt pada dasarnya mirip dengan tanggung jawab pengurus perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer (C.V.). Pada C.V. terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu pelepas uang (sekutu pasif) dan sekutu aktif yang mengurus perusahaan. Sekutu pasif mempunyai tanggung jawab sebatas nilai uang yang dimasukkan ke dalam perusahaan, ia tidak diperbolehkan melakukan pengurusan perusahaan (pasal 20 ayat (2) KUHD). Sedangkan sekutu aktif yang melakukan pengurusan perusahaan bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap pihak ketiga (pasal 19 ayat (1) KUHD).

Dalam kepustakaan, suatu perikatan tanggung renteng dapat terjadi bila dalam perikatan tersebut terdapat beberapa kreditur atau beberapa debitur. Perikatan tanggung renteng antar kreditur adalah perikatan yang krediturnya terdiri dari beberapa

orang dan masing-masing krediturnya berhak menuntut seluruh hutang meskipun perikatan itu dapat dibagi dan pembayaran kepada salah satu kreditur membebaskan debitur dari tanggung jawabnya kepada semua kreditur (pasal 1278 KUH.Perdata). Dalam perikatan tanggung renteng antar kreditur ini debitur dapat memilih untuk membayar kepada salah satu kreditur bila belum ada kreditur yang menggugat hutangnya. Hal ini berarti bahwa bila telah ada salah satu kreditur yang menagihnya maka debitur tersebut tidak dapat lagi menyerahkan pembayaran kepada kreditur lainnya tetapi harus diserahkan kepada kreditur yang menagihnya itu.

Perikatan tanggung renteng antar debitur adalah perikatan yang debiturnya terdiri dari beberapa orang dan masing-masing debitur itu dapat dituntut untuk keseluruhan hutang dan debitur tersebut tidak dapat minta hutangnya dipecah atau tidak dapat membayar hanya bagiannya saja (pasal 1280 dan 1283 KUH.Perdata). Pemenuhan kewajiban oleh salah satu debitur membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur tetapi debitur-debitur lainnya itu wajib membayar sebesar bagian masing-masing kepada debitur yang telah membayar kepada kreditur itu (pasal 1280 dan 1293 KUH.Perdata).

c. Tanggung Jawab Setelah Perseroan Didaftarkan dan Diumumkan

Seperti telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Pengurusan ini tentulah berlaku pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman. Kemudian dalam keadaan perseroan yang telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, hanyalah terletak pada segi bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Namun demikian, dalam hampir setiap rumusan mengenai pertanggungjawaban Direksi tersebut dimuka diketahui bahwa, setiap anggota Direksi selalu dihadapkan pada pertanggungjawaban renteng di antara sesama mereka, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan tersebut adalah di luar kesalahan dan kelalaiannya (pasal 60 ayat (4) UUPB jo pasal 90 ayat (3) UUPB). Rumusan-rumusan tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali fungsi Direksi sebagai suatu organ (dan bukan masing-masing pribadi) yang berkewajiban untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, dimana masing-masing anggota Direksi berwenang untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan. Dengan pertanggungjawaban renteng ini diharapkan dapat terjadi saling mengawasi

di antara sesama anggota Direksi perseroan atas setiap perbuatan Direksi yang dapat merugikan, baik perseroan, pemegang saham perseroan, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, memberikan konsekuensi hukum, bahwa Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang tidak membedakan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi terhadap perseroan. Di sini tanggung jawab Direksi adalah tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi secara bersama-sama (tanggung renteng). Setiap kerugian atau pemegang saham perseroan sebagai akibat tindakan – seorang anggota – Direksi, harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Walau demikian, untuk kepentingan praktis, pasal 83 ayat (1) UUPT memungkinkan masing-masing anggota Direksi bertindak untuk dan atas nama dan karenanya mewakili perseroan, kecuali dalam hal-hal ditentukan secara lain dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar perseroan.

3. Perbuatan dan Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas

a. Tanggung Jawab Sebelum Perseroan Didirikan

Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan perseroan untuk mengambilalih kegiatan dan pertanggungjawaban – dari perseroan dalam rencana – atas segala kegiatan dan pertanggungjawaban dari badan usaha lainnya, baik itu orang-perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer dan bentuk-bentuk usaha lainnya, baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum/tidak berbadan hukum, yang hendak mengubah bentuk usahanya menjadi perseroan terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu perseroan terbatas baru dapat dikatakan ada demi hukum – dengan pengertian telah memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak dalam hukum – jika perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Sebelum pengesahan diperoleh, perseroan hanyalah merupakan suatu persekutuan diantara para pendiri – dengan firma – dengan para pengurus. Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan belum mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Undang-

Undang mewajibkan diadakannya pengukuhan oleh perseroan atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus dan atau pendiri perseroan sebelum perseroan memperoleh pengesahan, segera setelah perseroan memperoleh pengesahan. Perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan akan menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya dari masing-masing pengurus dan atau pendiri yang melakukannya.

Pasal 10 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, *"Perbuatan hukum yang berkaitan dengan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian"*.

Ketentuan ini pada prinsipnya mengakomodasikan kepentingan para pendiri mengenai besarnya penyertaan dari semua pihak dalam perseroan, perbuatan hukum ini biasanya disertai atau diikuti dengan dokumen tertulis berupa perjanjian kerja sama usaha, atau yang lebih populer dengan nama *"joint venture agreement"*, yang antara lain memuat keterangan mengenai kesepakatan atau persetujuan dari para pendiri untuk melakukan penyetoran saham selain dengan / dalam bentuk uang tunai (seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UUPT).

Selanjutnya ketentuan pasal 10 ayat (2) UUPT mensyaratkan bahwa, *"Naskah asli atau salinan resmi akta*

otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada akta pendirian”, dengan pengertian bahwa dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian (penjelasan pasal 10 ayat (2) UUPT). Ketentuan ini memperjelas akan hak dan kewajiban serta komitmen dari masing-masing pendiri terhadap perseroan, segera setelah perseroan tersebut didirikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal 10 UUPT tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menerbitkan hak dan kewajiban bagi perseroan (pasal 10 ayat (3) UUPT). Ini berarti, selama perbuatan hukum tersebut tidak dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) UUPT dan dokumen pendukungnya tidak dilampirkan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) UUPT, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti pengurus perseroan berhak untuk tidak menerima segala macam penyeteroran saham dari pemegang saham selain dengan uang tunai, jika menurut penilaiannya hal tersebut dapat merugikan perseroan, kecuali jika penyertaan yang demikian telah disebutkan secara tegas dalam dokumen yang menyertai akta pendirian / Anggaran Dasar perseroan.

b. Perbuatan dan Tanggung Jawab Sebelum Perseroan Disahkan

Pasal 11 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan terbatas, sebelum perseroan terbatas tersebut disahkan atau sebelum menjadi badan hukum, mengikat perseroan terbatas setelah perseroan terbatas itu menjadi badan hukum, bila :

1. perseroan terbatas secara tegas menyatakan **menerima** semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;
2. perseroan terbatas secara tegas menyatakan **mengambil alih** semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan terbatas itu ;
3. perseroan terbatas **mengukuhkan** secara tertulis semua perjanjian hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu.

Penjelasan pasal 11 UUPT menyatakan bahwa, ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat setelah perseroan terbatas didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum. Penjelasan pasal 11 UUPT itu tidak menjelaskan kapan suatu perseroan terbatas dianggap telah didirikan? Tetapi

bila dilihat dari proses pendirian suatu perseroan terbatas yang dimulai dengan pembuatan akta pendiriannya lalu pengesahan, maka pasti yang dimaksud "*setelah perseroan terbatas didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum*" adalah waktu antara setelah ada akta pendirian sampai diberikannya pengesahan.

Hal ini berarti bahwa perbuatan hukum para pendiri yang dapat mengikat perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan dan dilakukan setelah adanya akta pendirian tetapi sebelum akta pendirian itu disahkan. Perbuatan hukum para pendiri sebelum adanya akta pendirian berarti menurut pasal 11 UUPT ini tidak dapat mengikat perseroan terbatas setelah menjadi badan hukum atau setelah disahkan walaupun secara tegas *diterima* atau *diambil alih* atau dikukuhkan.

Tindakan perseroan untuk ***menerima, mengambil alih*** atau ***mengukuhkan*** tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri sebelum perseroan didirikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penerimaan Tanggung Jawab oleh Perseroan

Pasal 11 ayat (1) butir (a) UUPT ini hanya menyatakan perbuatan hukum mengikat perseroan terbatas tanpa menyatakan para pendiri yang melakukan perbuatan hukum

itu menjadi terlepas dari perikatan hukum. Hal ini harus ditafsirkan bahwa dalam hal perbuatan hukum itu **diterima** secara tegas maka yang terikat atas perbuatan hukum tersebut adalah perseroan terbatas dan juga pendiri yang bersangkutan. Dalam pasal tersebut di atas, dimana perseroan terbatas hanya **menerima** semua perjanjian yang dibuat para pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri sebelum perseroan disahkan, maka para pihak dari perikatan tersebut tidak ada yang digantikan atau tidak terdapat pembaharuan utang atau *novasi* yang bersifat subjektif tetapi yang ada adalah hanyalah masuknya atau terikatnya perseroan terbatas ke dalam perikatan tersebut. Karena suatu pembaharuan utang tidak dapat dipersangkakan tetapi harus dinyatakan secara tegas dalam perbuatannya atau perikatannya (pasal 1415 KUH.Perdata). Jadi yang terjadi adalah meluasnya salah satu pihak perjanjian, dari hanya satu subjek hukum, yaitu pendiri, sekarang menjadi dua subjek hukum yang menggabung bersatu menjadi satu pihak, yaitu pendiri dan perseroan itu sendiri.⁵¹

2) Pengambilalihan Tanggung Jawab oleh Perseroan

Tetapi dalam pasal 11 ayat (1) butir (b) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan terbatas **mengambil alih**

⁵¹ Hardijan, S.H., *op cit*, halaman 61

semua hak dan kewajiban dari perikatan lama, maka hal ini terdapat penggantian pihak perjanjian dari para pendiri ke perseroan terbatas. Di sini terjadi pembaharuan utang atau *Novasi Subjektif*, karena kata mengambil alih berarti terjadinya pelepasan hak dan kewajiban yang diikuti dengan pengambilan hak dan kewajiban yang dilepaskan itu.⁵²

Hal ini benar, tetapi pasal 1417 KUH.Perdata juga menyatakan untuk sahnya suatu pembaharuan utang atau Novasi subjektif haruslah ada persetujuan krediturnya dan karena perbuatan dalam pasal 11 UUPU itu merupakan perbuatan pembaharuan utang maka pasal 1417 KUH. Perdata. berlaku untuk perbuatan tersebut. Pasal 1417 KUH.Perdata. ini harus berlaku juga bagi pembaharuan utang/ Novasi yang terjadi karena pengambilalihan semua hak dan kewajiban dari perbuatan hukum para pendiri tersebut, karena bila ketentuan pasal 1417 KUH.Perdata. ini tidak berlaku untuk hal tersebut maka dapat terjadi ketidakadilan.

Dari perbuatan mengambil alih tersebut, maka terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari para pendiri kepada perseroan, yaitu dari terikatnya pendiri atas perikatan yang dibuatnya itu sekarang yang terikat adalah hanya perseroan saja.

⁵² *Ibid*, halaman 62 – 63.

3) Pengukuhan Atas Perbuatan Hukum yang Dilakukan Atas Nama Perseroan

Dari pengertian kata **"menerima"** tidak menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan adanya pembaharuan utang melainkan adanya perluasan pihak perjanjian dengan masuknya perseroan terbatas sebagai pihak dalam perjanjian. Sedangkan pasal 11 ayat (1) butir (c) UUPT yang **"mengukuhkan"** perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, tetapi menimbulkan kekacauan hukum karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas, sedangkan perseroan pada saat itu belum menjadi badan hukum. Pengertian kata mengukuhkan seakan-akan berarti bahwa sebenarnya perseroan "terikat" dengan perjanjian yang dikukuhkan itu tetapi perlu ketegasan atau pengukuhan dari perseroan untuk benar-benar sah mengikat perseroan tersebut.

Pasal 11 ayat (1) butir (c) menyatakan bila perseroan terbatas yang telah mendapatkan status badan hukumnya mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu oleh para pendirinya pada waktu perseroan tersebut belum disahkan atau belum berstatus badan hukum. Bila perseroan terbatas belum disahkan berarti perseroan itu belum berstatus badan

hukum dan berarti pula perseroan itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Tanggung Jawab Hukum Setelah Perseroan Terbatas Disahkan

Sudah menjadi pendapat umum bagi kalangan ahli hukum bahwa sah tidaknya suatu perbuatan hukum sangatlah bergantung pada dipenuhi tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Kewenangan ini oleh kalangan ahli hukum digolongkan ke dalam kewenangan yang berdasarkan pada :

1. kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri ;
2. kapasitas sebagai pemegang kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama dari pemberi kuasa ;
3. kapasitas untuk bertindak dalam jabatan, yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan jabatannya tersebut.

Konsep kewenangan bertindak ini menjadi penting, terutama jika dihubungkan dengan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif sahny suatu perjanjian. Hukum perjanjian dan lazimnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengancam setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif ini, dengan ancaman kebatalan (dapat dibatalkan) setiap saat, selama masa daluarsa masih belum

terlewat, dan atau dalam hal perjanjian ini tidak "*diratifikasi*" lebih lanjut. Dalam KUH.Perdata, hak untuk membatalkan perjanjian yang demikian diberikan kepada mereka, terhadap siapa syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi.

Dengan berbagai macam variasi yang mungkin ditemui dalam praktek, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pada hampir semua negara, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang patut diduga berwenang bertindak untuk dan atas nama dan karenanya mewakili perseroan, harus diterima dan diperlakukan sebagai perbuatan hukum perseroan sepenuhnya. Demikian pula ketiadaan pemenuhan akan syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku tidak membatalkan perbuatan hukum tersebut, perbuatan hukum tersebut dianggap tetap mengikat perseroan. Ini berarti perseroan harus menanggung segala akibat hukumnya, walaupun dalam hal-hal tersebut di atas "*syarat subjektif*" sahnya perbuatan hukum tersebut sebenarnya tidak terpenuhi. Dan oleh sebab itu pula untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, pada banyak negara telah diberlakukan mekanisme keterbukaan (*disclosure*) tertentu, yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kewenangan bertindak dari Direksi, termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama

perseroan, serta pembatasan kewenangan-kewenangannya. Ketentuan mengenai keterbukaan atau *disclosure* ini diharapkan dapat mengurangi seminimal mungkin risiko-risiko hukum yang tidak diharapkan.

Satu hal yang harus diperhatikan juga di sini adalah mengenai kedudukan / posisi Direktur perseroan dalam perseroan, dimana hubungan kerja yang berlaku antara Direksi perseroan dan perseroan ditetapkan sebagai *hubungan kerja* biasa, sebagaimana layaknya seorang karyawan perseroan. Sebagai suatu hubungan kerja perburuhan, Direktur wajib melakukan segala tugas yang diberikan oleh perseroan dengan baik, jika ia tidak ingin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas setiap perbuatannya yang menyimpang dari tugas dan kewenangan yang telah diberikan.⁵³

⁵³ *Ibid*, halaman 122.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta beberapa Doktrin hukum yang mengajarkan tentang tanggung jawab hukum Pengurus/Direksi perseroan terbatas, maka berikut ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. HASIL PENELITIAN

1. Tanggung Jawab Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Disahkan

Tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, apabila diteliti dalam peraturan perundang-undangan, baik sewaktu perseroan terbatas masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 : 23), maupun setelah perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan dasar utama dalam memberikan kemungkinan semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tetap dipergunakan setelah Negara Indonesia merdeka, sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, selama belum ada undang-undang dan peraturan-peraturan nasional yang mengaturnya.

Oleh karenanya, Perseroan Terbatas masih tetap diatur dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* – (*Staatsblad* 1847 : 23) yang mulai diberlakukan sejak 01 Mei 1848. Dalam *W.v.K.* tersebut, perseroan terbatas diatur dalam Buku Kesatu, Bab III, Bagian Ketiga, mulai pasal 36 sampai dengan 56. Dari keseluruhan pasal di atas, ternyata secara eksplisit tidak ada pasal yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pendiri perseroan terbatas yang perseroan tersebut belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman. Namun hanya ada 4 pasal yang mengatur tentang bagaimana hal *pengesahan* perseroan terbatas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pengesahan tersebut dapat diakui, dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL I
PENGATURAN TENTANG PENGESAHAN PERSEROAN
TERBATAS DAN PERSYARATANNYA
BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

No	Pasal	Hal yang Diatur
01	36	Keharusan pengesahan atas akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya oleh Menteri Kehakiman.
02	37	Pemberian, penolakan, serta syarat-syarat pemberian pengesahan perseroan terbatas oleh Menteri kehakiman.
03	50	Persyaratan bagi pendiri perseroan untuk mewakili sebagian dari modal persekutuan, dan modal tersebut sudah harus ditempatkan sebelum perseroan disahkan.
04	51	Persyaratan harus disetornya modal dasar yang telah ditempatkan sebelum perseroan disahkan.

Sumber : Bahan Hukum Primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal yang tersebut dalam Tabel I di atas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 36 :

- (1) *Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata ;*
- (2) *Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya.*

- (3) Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus di peroleh pengesahan yang sama.

2. Pasal 37 :

- (1) Jika perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum, dan untuk selainnyapun tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya, sedangkan akta pendiriannya pula tak memuat ketentuan-ketentuan yang bersalahan dengan segala apa yang teratur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 55, maka pengesahan harus diberikan ;
- (2) Dalam hal pengesahan itu ditolak, maka alasan penolakan harus diberitahukan kepada para pemohon untuk diketahuinya, kecuali kiranya pemberitaan yang demikian itu tidak baik ditimbangnya ;
- (3) Jika ada alasan untuk itu, pengesahan tadi bisa digantungkan pada syarat, bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan, manakala pembubaran oleh Menteri Kehakiman perlu ditimbangnya demi kepentingan umum ;
- (4) Apabila pengesahan itu diberikan dengan tak bersyarat, maka atas kekuasaan umumpun tak bolehlah perseroan dibubarkan, melainkan setelah oleh Mahkamah Agung, yang dalam urusan ini harus didengar, dinyatakannya, bahwa para pengurusnya telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pendirian tersebut dalam akta perseroan.

3. Pasal 50 :

Pengesahan termaksud dalam pasal 36 tak akan diberikan, melainkan apabila ternyata bahwa sekalian pesero pendiri-pertama telah mewakili paling sedikitnya seperlima dari modal persekutuan; lagi pun harus ditentukan juga tenggangwaktu, dalam mana semua sero atau andil lainnya telah harus ditempatkannya. Tenggangwaktu itu atas permohonan semua pesero pendiri pertama, oleh Presiden atau oleh pejabat yang menurut ayat kedua pasal 36 ditunjuk oleh Presiden, masih juga dapat diperpanjang.

4. Pasal 51 :

Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya.

b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan peraturan hukum baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada 07 Maret 1995, yang terdiri dari 129 pasal dan mulai berlaku efektif sejak 07 Maret 1996. UUPT ini diselenggarakan sebagai pengganti pasal 36 s/d 56 KUHD yang telah berlaku sejak Tahun 1848.

Dibuatnya Undang-Undang Perseroan Terbatas ini didasari atas beberapa pertimbangan sebagai berikut : ⁵⁴

1. karena peraturan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847 : 23*) sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini ;
2. karena disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD, masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op aandeelen, Staatsblad 1939 –569 jo 717*). Jadi UUPT ini dibuat dalam rangka menciptakan kesatuan hukum serta untuk menghilangkan dualisme pengaturan itu ;
3. karena pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 ini, maka ketentuan-ketentuan pada :

⁵⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, bagian Menimbang; huruf (b),(c), dan (d).

- a. pasal 36 sampai pasal 56 KUHD yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, berarti sejak tanggal 7 Maret 1996 ;
- b. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT). Karena UUPT ini berlaku sejak 7 Maret 1996, berarti Ordonansi Maskapai Andil Indonesia mulai tidak berlaku sejak tanggal 7 Maret 1999.

Segala peraturan pelaksanaan dari pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam UUPT, pengaturan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri / pemegang saham perseroan terbatas atas nama perseroan sebelum perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan bagaimana tanggung jawabnya, hanya terdapat satu pasal yang mengatur hal tersebut, yakni :

Pasal 11 :

- (1) *Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :*
 - a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga ;*
 - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan ; atau*
 - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.*
- (2) *Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambilalih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.*

2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Sebelum Perseroan Terbatas didaftar dan diumumkan

Tanggung jawab Direksi sebelum perseroan terbatas didaftar dan diumumkan, dapat ditemukan baik pada saat masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* – *Saatstblad 1847 : 23*) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang sedang berlaku. Pengaturan atas hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Hasil penelitian atas pasal-pasal yang mengatur tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847 : 23*), tidak ditemukan adanya kata "Direksi" selaku salah satu organ perseroan, melainkan kata yang dipergunakan KUHD untuk menunjukkan arti Direksi tersebut adalah dengan menggunakan kata "Pengurus", sebagaimana dapat dilihat pada pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

" Tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris ".

Sebagai salah satu organ perseroan – menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang – pengaturan tentang tanggung jawab hukum pengurus sebelum perseroan terbatas disahkan, hanya diatur dalam 1 (satu) pasal pada KUHD; yaitu :

Pasal 39 :

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga ;

Selanjutnya, mengenai kewajiban untuk melakukan "pendaftaran" dan "pengumuman" perseroan dan bagaimana pertanggungjawabannya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, kiranya dapat diperbandingkan dengan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (RUU-KUHD) yang disusun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1968 yang menyatakan sebagai berikut : ⁵⁵

Pasal 68 :

Setelah pendiri-pemegang saham, kuasa khusus atau notaris termaksud pada pasal 66 ayat (1) menerima pemberitaan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, maka ia atau lain pendiri yang khusus dikuasakan secara tertulis, minta secara tertulis atau dengan lisan pendaftarannya akta pendirian seluruhnya dan keputusan pengesahan Menteri Kehakiman kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya perseroan, untuk didaftar dalam buku daftar yang telah tersedia di Kepaniteraan, dari tanggal permintaan mana dicatat oleh Panitera.

Pasal 69 :

Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban selambat-lambatnya dalam tujuh hari, setelah tanggal penerimaan dan permintaan pendaftaran, melakukannya itu dan dari tanggal dan nomor pendaftaran, segera, selambat-lambatnya dalam tujuh hari,

⁵⁵ Ketua Badan Perencana/Kepala LPHN, *Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang- Undang Hukum Dagang*, Penerbitan III, (Jakarta : Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1968), halaman 41– 42.

sesudah tanggal pendaftaran, secara tertulis memberitahukan tentang tanggal dan nomor pendaftaran itu kepada pemohon.

Pasal 70 :

- (1) Setelah yang berkepentingan termaksud menerima pemberitaan tentang tanggal dan nomor pendaftaran di Pengadilan Negeri, maka ia, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari sesudah tanggal penerimaan, menyelenggarakan pengumumannya akta pendirian dan pengesahannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penanggung jawab dari majalah resmi itu berkewajiban selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan setelah tanggal penerimaan permintaan pengumuman melaksanakannya bagi kepentingan umum.
- (3) Tanggal penerbitan majalah resmi tersebut adalah tanggal mulainya perseroan terbatas berkedudukan sebagai badan hukum.

Penjelasan Pasal 68, 69, dan 70 :

Berlainan dengan W.v.K. yang dicabut, dalam kodifikasi ini petugas-petugas yang bersangkutan dibatasi dengan tenggang-tenggang yang pasti untuk memenuhi kewajibannya masing-masing buat pendaftaran dan pengumuman, agar supaya status badan hukum p.t. selekasnya dapat tercapai. Lagi pula dalam pasal 70 ayat 3 ditegaskan dengan jelas, mulai kapanakah p.t. berkedudukan badan hukum, hal mana tidak ditetapkan dengan pasti di dalam W.v.K yang dicabut.

Kemudian mengenai apa akibat hukumnya apabila kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman atas perseroan yang dimaksud belum dilakukan, hal ini diatur dalam pasal 71 Rancangan KUHD tersebut :

Pasal 71 :

Selama pendaftaran dan pengumuman pengesahan akta pendirian belum terlaksana menurut pasal 68 dan 70, maka para pengurus yang mungkin sudah diadakan diwaktu pendirian, dalam hal perbuatan hukum mereka dengan pihak ketiga, secara pribadi dan untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pihak ketiga itu, disamping kekayaan yang telah dikumpulkan untuk bersama berusaha untuk perseroan terbatas.

Penjelasan pasal 71 :

Justru untuk mengakhiri keadaan yang diatur dalam pasal ini, yaitu pertanggungan jawab para pengurus yang mungkin sudah ada secara pribadi untuk sepenuhnya, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mempercepat tercapainya status badan hukum p.t., sebagai diatur di atas.

b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dinyatakan bahwa :

"Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".

Direksi *mewakili* perseroan. Dengan demikian Direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dari bunyi pasal 1 ayat (4) tersebut dapat dipahami bahwa Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat luas dan besar, sehingga perlu diatur secara khusus mengenai tanggung jawab hukumnya. Dalam UUPT secara eksplisit telah diatur beberapa pasal yang saling berhubungan mengenai bagaimana tanggung jawab hukum Direksi sebelum perseroan disahkan, yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL II
PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI
SEBELUM PERSEROAN TERBATAS DIDAFTRAR DAN
DIUMUMKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

No	Pasal	Hal yang Diatur
01	21	Ayat 1 : Hal-hal yang harus didaftarkan oleh Direksi perseroan dalam Daftar Perusahaan ;
		Ayat 2 : Jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pendaftaran perseroan ;
02	22	Ayat 1 : Pengumuman Perseroan dalam Berita Negara;
		Ayat 2 : Jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pengumuman perseroan ;
		Ayat 3 : Tata cara pengajuan pengumuman.
03	23	Tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan.

Sumber : Bahan Hukum Primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal tersebut dalam Tabel II di atas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 21 :

Ayat (1) : Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dalam pasal 7 ayat (6) ;*
- b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ;*
- c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).*

Ayat (2) : Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

2. Pasal 22 :

Ayat (1) : Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ;

Ayat (2) : Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran ;

Ayat (3) : Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pasal 23 :

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penelitian atas proses pendaftaran perseroan terbatas pada Daftar Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diharuskan dalam pasal 21 UUPT, hanya dapat dilakukan dalam wilayah hukum Kantor Pendaftaran Perusahaan / Kantor Perindustrian dan Perdagangan di Pontianak. Adapun hasil penelitian atas hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL III

**JUMLAH P.T. DAN C.V. YANG MELAKUKAN
PENDAFTARAN PADA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DI PONTIANAK (TAHUN 1997 s/d 2001)**

Tahun	Jumlah PT & CV Yang Terdaftar	PT Yang Terdaftar	%	CV Yang Terdaftar	%
1997	149	81	54,36	68	45,64
1998	118	58	49,15	60	50,85
1999	161	32	19,88	129	80,12
2000	233	65	27,90	168	72,10
2001	346	96	27,75	250	72,25

Sumber : Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak

Dari Tabel III di atas dapat dilihat bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) – yang mulai berlaku pada 07 Maret 1996 – pelaksanaan pendaftaran perusahaan yang berbentuk PT di Kantor Perindustrian dan Perdagangan / Kantor Pendaftaran Perusahaan di Pontianak dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan 2001, menunjukkan angka yang cukup signifikan, yakni pada tahun 1997 jumlah PT yang didaftar pada kantor tersebut hanyalah berjumlah 81 perusahaan, kemudian dua tahun berikutnya jumlahnya menurun secara berurutan, yakni sejumlah 58 perusahaan pada tahun 1998 dan 32 perusahaan pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan adanya peningkatan lagi, yakni secara berurutan Perseroan Terbatas yang melakukan pendaftaran pada tahun 2000 adalah sebanyak 65 perusahaan dan pada tahun 2001 sebanyak 96 perusahaan.

Kemudian apabila jumlah PT yang telah melakukan pendaftaran perusahaan dibandingkan dengan jumlah PT dan CV yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di Pontianak, sejak berlakunya UUPT pada 07 Maret 1996 – yakni dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 – menunjukkan angka persentase yang semakin tahun semakin menurun. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah PT yang melakukan pendaftaran perusahaan pada tahun 1997 yakni

sebesar 54,36 %, kemudian menurun menjadi 49,15 % pada tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 angka persentasenya menunjukkan adanya penurunan lagi yaitu hanya sebesar 19,88 % dari jumlah PT & CV yang terdaftar. Setelah itu pada tahun 2000 dan tahun 2001 menunjukkan adanya sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan angka persentase pada tahun 1999, yakni bahwa pada tahun 2000 angka persentase PT yang melakukan pendaftaran perusahaan adalah sebesar 27,90 % dan pada tahun 2001 menunjukkan angka 27,75 % dari jumlah PT & CV yang terdaftar.

Sejalan dengan itu, apabila diteliti pada angka persentase perusahaan yang berbentuk CV yang melakukan pendaftaran perusahaan pada kurun waktu yang sama, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Persentase pendaftaran CV dalam 3 tahun pertama dalam kurun waktu tersebut meningkat terus, yakni pada tahun 1997 sebesar 45,64 % meningkat menjadi 50,85 % pada tahun 1998, dan kemudian pada tahun 1999 meningkat lagi menjadi 80,12 %. Setelah itu pada tahun 2000 dan tahun 2001, angka persentase CV yang melakukan pendaftaran perusahaan sedikit menurun secara berurutan sebesar 72,10 % dan 72,25 % dari jumlah PT dan CV yang terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah seorang staff yang menangani bidang pendaftaran perusahaan pada Kantor Pendaftan Perusahaan di Pontianak, dinyatakan bahwa sejak berlakunya UUPT 1995, keadaan *menurunnya* angka persentase PT dan *meningkatnya* angka persentase CV yang melakukan pendaftaran perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan di Pontianak, menunjukkan adanya indikasi bahwa para pengusaha di Pontianak, sejak berlakunya UUPT 1995 – yang telah mengatur lebih tegas – mengenai adanya *tanggung-jawab pribadi yang tidak terbatas* bagi pendiri/pemegang saham maupun Direksi perseroan, menyebabkan mereka lebih cenderung beralih pada pilihan bentuk perusahaan yang semula direncanakan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroan Komanditer (CV), selain alasan tersebut di atas, juga dipengaruhi dengan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengurusan pendirian perusahaan yang berbentuk PT jika dibandingkan dengan bentuk CV yang relatif lebih murah.

Selanjutnya apabila diteliti ketentuan yang datur dalam pasal 125 UUPT tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi :

Ayat (1) Akta Pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini ;

Ayat (2) Akta Pendirian perseroan yang belum disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya undang-undang ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini ;

Ayat (3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

maka, dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa, kewajiban pendaftaran perseroan terbatas yang dimaksud pembuat undang-undang bukan hanya berlaku bagi perseroan yang baru berdiri pada saat telah diberlakukannya UUPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 undang-undang ini, tetapi juga berlaku bagi perseroan terbatas yang akta pendiriannya belum disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya UUPT, wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini (*vide* pasal 125 ayat (2) UUPT). Kemudian waktu

yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyesuaian adalah 2 tahun terhitung sejak UUPT mulai berlaku. Karena UUPT mulai berlaku 07 Maret 1996, maka waktu yang diberikan untuk penyesuaian terakhir adalah pada 06 Maret 1998.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan / Kantor Perindustrian dan Perdagangan di Pontianak, dijelaskan bahwa pelayanan pelaksanaan pendaftaran bagi perseroan terbatas yang melakukan penyesuaian dengan UUPT, baru dapat dilakukan pendaftarannya sejak September Tahun 1999, berhubung berbagai hal yang harus dipersiapkan oleh pihak Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk melayani pendaftaran perseroan terbatas tersebut.

Adapun data-data yang diperoleh atas pendaftaran bagi perseroan terbatas yang telah menyesuaikan dengan UUPT, yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Pontianak adalah sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL IV
PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
MENYESUAIKAN DENGAN UUP
PADA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DI PONTIANAK (TAHUN 1999 – 2000)

Tahun Penye- suaian	PT Yang Terdaftar	Telah Menyesuai- kan dengan UUP	%	Belum Me- nyesuai- kan dengan UUP	%
1999	88 (Thn 1994)	32	36,36	56	63,64
2000	80 (Thn 1995)	03	3,75	77	96,25

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak

Dari Tabel IV di atas, dapat dipahami bahwa, pendaftaran perseroan terbatas yang akta pendirian perseroan maupun Anggaran Dasar perseroannya yang telah menyesuaikan dengan UUP, yang kemudian telah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pontianak pada tahun 1999 adalah sebanyak 32 perseroan atau 36,36 % dari 88 perseroan yang telah terdaftar sebelumnya pada tahun 1994, sedangkan perseroan yang belum melakukan penyesuaian dan pendaftaran pada waktu yang sama adalah sebanyak 56 perseroan atau 63,64 % dari perseroan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2000, jumlah perseroan yang telah mendaftarkan perseroannya

hanya sebanyak 3 perseroan atau 3,75 % dari 80 perseroan yang telah terdaftar pada tahun 1995 – sebelum berlakunya UUPT – sedangkan yang belum mendaftar sebanyak 77 perseroan atau 96,25 % dari jumlah perseroan yang pernah melakukan pendaftaran sebelum berlakunya UUPT, namun belum melakukan penyesuaian dan pendaftaran ulang di Kantor Pendaftaran Perusahaan Pontianak.

3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Setelah Perseroan Terbatas didaftar dan diumumkan

Tanggung jawab Direksi **setelah** perseroan terbatas didaftar dan diumumkan, dapat ditemukan baik pada saat masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* – *Staatsblad 1847 : 23*) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang sedang berlaku. Pengaturan atas hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai salah satu organ perseroan – menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang – setelah perseroan terbatas disahkan, maka pengurus (Direksi) mempunyai tanggung jawab hukum yang dapat diperinci sebagai berikut :

TABEL V
PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
PENGURUS SETELAH PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN
BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

No	Pasal	Hal yang Diatur
01	45	Ayat (1) : Tanggung jawab para pengurus yang bukan Pemegang saham, tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka sebaik-baiknya.
		Ayat (2) : Dua macam bentuk tanggung jawab Pengurus yang Merangkap sebagai pemegang Saham ;
02	47	Ayat (1) : Kewajiban Pengurus untuk mendaftarkan dan mengumumkan perseroan apabila telah rugi 50 % dari modalnya.
		Ayat (2) : Perikatan yang dilakukan pengurus sesudah Perseroan rugi 75 % akan menjadi tanggung jawab pengurus secara pribadi untuk keseluruhan.

Sumber : Bahan Hukum Primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal tersebut dalam Tabel V di atas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 45 :

Ayat (1) : Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; mereka-pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga ;

Ayat (2) : Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang kerennanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

2. Pasal 47 :

Ayat (1) : Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara ;

Ayat (2) : Jika kerugian tadi sebesar tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya.

b. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Direksi adalah pengurus perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat luas dan besar, sehingga perlu diatur secara khusus mengenai tanggung jawab hukumnya. Dalam UUPT secara

eksplisit telah diatur beberapa pasal mengenai bagaimana tanggung jawab hukum Direksi *setelah* perseroan terbatas didaftar dan diumumkan, yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL VI
PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI
SETELAH PERSEROAN TERBATAS DISAHKAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

No	Pasal	Hal yang Diatur
01	30	Ayat 1 : Ketentuan-ketentuan yang disyaratkan agar perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan ;
		Ayat 2 : Syarat kebatalan demi hukum dan pengembalian pembayaran kepada perseroan atas perolehan saham yang bertentangan dengan ayat (1) ;
		Ayat 3 : Tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum pembelian kembali sahamnya.
02	85	Ayat 1 : Hal menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan oleh Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
		Ayat 2 : Tanggung jawab penuh Direksi secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
03	90	Tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kepailitan sehingga kekayaan perseroan terbatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut.

Sumber : Bahan Hukum Primer

Bunyi selengkapnya pasal-pasal tersebut dalam Tabel VI di atas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 30 :

Ayat (1) : Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :

a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Ayat (2) : Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayarannya yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.

Ayat (3) : Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

2. Pasal 85 :

Ayat (1) : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan ;

Ayat (2) : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

3. Pasal 90 :

Ayat (1) : Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS ;

Ayat (2) : Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu ;

Ayat (3) : Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Disahkan

Untuk mendirikan perseroan terbatas tidaklah cukup hanya membuat akta pendirian yang dilakukan secara otentik, namun harus menempuh beberapa fase yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus untuk itu. Merupakan suatu keharusan, artinya bahwa, akta pendirian perseroan terbatas setelah selesai dibuat, terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Agar pengesahan dimaksud dapat diperoleh, maka prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara para pendiri perseroan terbatas secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman, dengan melampirkan akta pendirian perseroan terbatas.

Permasalahan akan timbul, adalah apabila suatu perseroan terbatas yang telah berdiri namun belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sementara para pendiri telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang mengatasnamakan perseroan. Dalam keadaan demikian, siapakah yang akan dibebani tanggung jawab untuk melindungi kepada pihak ketiga yang mempunyai itikad baik ?

Dalam pembahasan ini, penulis akan meninjau dari dua sudut pandang, yakni yang didasari pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diberlakukan sekarang.

a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Di dalam KUHD tidak ditetapkan berapa orang sedikitnya secara sah dapat mendirikan perseroan terbatas. Di Jerman ditentukan sedikitnya satu orang, sedangkan di Perancis dan Belgia paling sedikit harus 7 orang, baru dapat secara sah untuk mendirikan perseroan terbatas. Menurut **Prof. Sukardono**, di Indonesia sedikit-dikitnya harus dua orang.⁵⁶

Berdasarkan pasal 38 ayat 1 jo pasal 36 ayat (2) KUHD, perseroan terbatas harus didirikan dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris), dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses untuk mensahkan pendirian perseroan terbatas. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yang dibuat di hadapan

⁵⁶ Kansil, C.S.T., Drs., S.H., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, Cetakan kelima (edisi revisi), (Jakarta – PT. Pradnya Paramita, 1995), halaman 24.

notaris itu berisi persetujuan-persetujuan perseroan terbatas yang di dalamnya dimasukkan Anggaran Dasar (*statuten*) perseroan yang memuat :

- a. nama perseroan terbatas ;
- b. tempat kedudukan ;
- c. maksud dan tujuan ;
- d. lamanya akan bekerja ;
- e. cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga ;
- f. hak dan kewajiban pesero dan pengurus.

Walaupun di dalam KUHD tidak secara tegas memisahkan antara istilah akta pendirian dan Anggaran Dasar, namun di dalam praktek selalu terdapat Anggaran Dasar perseroan terbatas di dalam akta pendiriannya.

Menurut pasal 36 ayat (2) KUHD, akta pendirian perseroan terbatas yang telah dibuat harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Menteri Kehakiman adalah pejabat yang bertugas untuk membuat dan memberikan pengesahan atas akta tersebut. Menteri Kehakiman berhak menolak atau memberikan pengesahan akta yang diajukan. Pengesahan ini diperlukan juga untuk setiap perubahan syarat-syarat perseroan terbatas dan untuk memperpanjang berlakunya perseroan terbatas. Syarat pengesahan Menteri Kehakiman itu dipandang perlu untuk menjaga supaya pendirian perseroan terbatas itu tidak bertentangan dengan

kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum atau undang-undang.

Pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman tersebut didasari pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 37 dan 50 KUHD sebagai berikut :

- a. harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 37 ayat 1). Untuk ini harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan ;
- b. akta pendirian tidak boleh memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam pasal 38 sampai dengan 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapa jumlah modal perseroan ;
- c. dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan dan berjanji untuk menyeter sedikit-dikitnya seperlima dari modal dasar perseroan (*vide* pasal 50 KUHD) ;
- d. dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing ;
- e. perseroan terbatas yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.

Bilamana semua syarat tersebut ternyata dipenuhi, barulah Menteri Kehakiman berwenang untuk mengesahkan akta

termaksud. Jika permohonan pengesahan itu ditolak, haruslah alasan-alasan tersebut diberitahukan kepada pemohon.

Selain Menteri Kehakiman dapat menolak pengesahan tersebut – menurut pasal 37 ayat (3) KUHD – beliau dapat memberikan pengesahan bersyarat, yaitu bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan manakala oleh Menteri Kehakiman dipandang perlu untuk kepentingan umum. Apabila pengesahan itu diberikan tanpa syarat, maka perseroan terbatas yang bersangkutan tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Menteri Kehakiman, kecuali atas persetujuan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa, para pengurusnya lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dapat terjadi sesuatu atas perseroan terbatas yang sudah didirikan dengan akta notaris, namun belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman tetapi telah melakukan usahanya dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini sudah tepat bahwa, pesero pendiri yang akan bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut.

b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 (UUPT)

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 (UUPT), dinyatakan bahwa, suatu perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 orang – baik orang pribadi maupun badan

hukum – atau lebih, kecuali bagi perseroan terbatas Persero yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pengesahan maupun penolakan diberikan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat 2 *juncto* ayat 3 UUPT). Dari hasil penelitian atas lima responden – perusahaan perseroan terbatas – yang melakukan kegiatan di kota Pontianak, seluruhnya memberikan kuasa kepada notaris untuk melaksanakan permohonan pengesahan perseroan terbatas kepada Menteri Kehakiman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan seorang notaris sangatlah penting dan diperlukan dalam hal mendukung proses pendirian suatu perseroan terbatas hingga perolehan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Pengesahan perseroan terbatas adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab apabila pengesahan tersebut belum diperoleh dan para pendiri telah melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, maka akan menimbulkan permasalahan siapakah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan hukum tersebut ?

Dalam pasal 11 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan terbatas, sebelum perseroan terbatas tersebut disahkan atau sebelum menjadi badan hukum, mengikat perseroan terbatas setelah perseroan terbatas itu menjadi badan hukum, bila :

1. Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan **menerima** semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ke tiga ;
2. Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan **mengambil alih** semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan terbatas itu ;
3. Perseroan Terbatas **mengukuhkan** secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu.

Penjelasan pasal 11 UUPT menyatakan bahwa ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat *setelah* perseroan terbatas didirikan *tetapi belum disahkan* menjadi badan hukum. Penjelasan tersebut tidak menjelaskan *kapan* suatu perseroan terbatas didirikan, tetapi bila dilihat dari proses pendirian suatu perseroan terbatas yang dimulai dengan pembuatan akta

pendiriannya lalu pengesahan, maka pasti sudah, yang dimaksud "setelah perseroan terbatas didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum" adalah waktu antara setelah ada akta pendirian sampai diberikannya pengesahan.

Hal ini berarti bahwa perbuatan hukum para pendiri yang dapat mengikat perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan dan dilakukan setelah adanya akta pendirian tetapi sebelum akta pendirian itu disahkan. Dengan demikian maka perbuatan hukum para pendiri *sebelum adanya* akta pendirian berarti menurut pasal 11 UUPM ini tidak dapat mengikat perseroan terbatas setelah menjadi badan hukum atau setelah disahkan walaupun secara tegas diterima atau diambilalih atau dikukuhkan.

Dalam pasal 11 ayat (1) huruf a UUPM tersebut hanya menyatakan bahwa perbuatan hukum mengikat perseroan terbatas tanpa menyatakan para pendiri yang melakukan perbuatan hukum itu menjadi *terlepas* dari perikatan hukum. Hal ini harus ditafsirkan bahwa dalam hal perbuatan hukum itu *diterima* secara tegas maka yang terikat atas perbuatan hukum tersebut adalah perseroan terbatas dan *juga* pendiri yang bersangkutan. Artinya perseroan terbatas hanya menerima semua perjanjian yang dibuat para pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri sebelum perseroan disahkan, maka para

pihak dari perikatan tersebut tidak ada yang digantikan atau tidak terdapat pembaharuan utang atau NOVASI yang bersifat subyektif, tetapi yang ada adalah hanyalah masuknya atau terikatnya perseroan terbatas ke dalam perikatan tersebut. Karena suatu pembaharuan utang tidak dapat dipersangkakan tetapi harus dinyatakan secara tegas dalam perbuatannya atau perikatannya (*vide* pasal 1415 KUH.Perdata). Jadi yang terjadi adalah meluasnya salah satu pihak perjanjian, dari hanya satu subyek hukum, yaitu pendiri, sekarang menjadi dua subyek hukum yang bergabung bersatu menjadi satu pihak, yaitu pendiri dan perseroan itu sendiri.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) huruf b UUPT yang menyatakan perseroan terbatas **mengambil alih** semua hak dan kewajiban dari perikatan lama maka dalam hal ini terdapat penggantian pihak perjanjian dari para pendiri ke perseroan terbatas. Di sini terjadi pembaharuan utang atau Novasi subyektif, karena kata mengambil alih berarti terjadinya pelepasan hak dan atau kewajiban yang diikuti dengan pengambilan hak dan kewajiban yang dilepaskan itu.

Menurut pasal 11 ayat (1) huruf b UUPT, perikatan atau perjanjian yang dibuat pendiri yang dapat diambil alih adalah perjanjian yang dibuat atau dilakukan baik atas nama perseroan terbatas itu maupun yang dilakukan tidak atas nama perseroan

terbatas. Sebenarnya secara hukum, perjanjian yang dapat diambil alih adalah hanya perjanjian yang dilakukan tanpa atas nama perseroan saja. Alasannya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan merupakan perjanjian yang tidak sah atau tidak mengikat, karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Pada waktu perjanjian itu dibuat, perseroan belumlah disahkan atau belum berstatus badan hukum (tidak cakap) atau belum menjadi subjek hukum, karena itu perseroan tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum. Jadi perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan itu tidak memenuhi syarat kapasitas atau tidak memenuhi syarat kecakapan pihak pembuat perjanjian, karenanya perjanjian itu adalah tidak sah.

Novasi subjektif tidak dapat terjadi secara otomatis tetapi kreditur atau pihak kedua dari perikatan yang akan diperbaharui itu harus menyatakan secara **tegas** tentang maksudnya membebaskan debitur dalam hal ini para pendiri itu (*vide* pasal 1417 KUH.Perdata). Masalahnya sekarang benarkah pengambilalihan ini tidak berlaku secara otomatis ? Bukankah pasal 11 UUPA ini menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan dalam hal pengambilalihan itu ?

Hal ini benar, tetapi pasal 1417 KUH.Perdata juga menyatakan untuk sahnya suatu pembaharuan utang atau Novasi subjektif haruslah ada persetujuan krediturnya dan karena perbuatan dalam pasal 11 UUPT itu merupakan perbuatan pembaharuan utang, maka pasal 1417 KUH.Perdata berlaku pula atas perbuatan tersebut. Pasal 1417 KUH.Perdata ini harus berlaku juga bagi pembaharuan utang / Novasi yang terjadi karena pengambilalihan semua hak dan kewajiban dari perbuatan hukum para pendiri tersebut, karena bila ketentuan pasal 1417 KUH.Perdata ini tidak berlaku untuk hal tersebut, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap pihak kreditur yang mengadakan perikatan dengan pendiri perseroan terbatas.

Pembaharuan utang atau Novasi adalah suatu perjanjian yang merupakan penggantian dari perjanjian yang lama (sudah ada sebelumnya). Menurut pasal 1413 KUH.Perdata, pembaharuan utang atau Novasi ada 3 macam, yaitu :

1. *Novasi Objektif*, yakni bila para pihak perjanjian membuat suatu perjanjian baru guna menggantikan perjanjian lama. Dalam Novasi Objektif ini para pihak dalam perjanjian yang lalu adalah sama dengan para pihak dalam perjanjian penggantinya, yang berubah adalah isi perjanjian itu sendiri.
2. *Novasi Subjektif pasif*, yakni suatu perjanjian baru yang dibuat dengan debitur baru yang menggantikan perjanjian lama dengan debitur yang lama tersebut. Dalam Novasi Subjektif pasif ini isi perjanjian sama tetapi debiturnya

berubah. Dalam pembaharuan utang ini debitur lama itu dibebaskan dari kewajiban oleh krediturnya dengan pernyataan yang tegas dan sebagai penggantinya ditunjuk orang lain sebagai debitur baru dalam perjanjian yang sama itu. Dalam pembaharuan utang dengan debitur baru (Novasi Subjektif pasif), hak-hak istimewa dan hipotik pada perikatan lama tidak berpindah pada barang-barang debitur baru (*vide* pasal 1422 KUH.Perdata).

3. *Novasi Subjektif aktif*, yakni suatu perjanjian baru yang dibuat dengan krediturnya yang baru sebagai pengganti perjanjian yang lama dengan kreditur yang lama tersebut. Dalam kenyataannya suatu pembaharuan utang / Novasi dapat merupakan gabungan dari macam-macam bentuk Novasi tersebut di atas, seperti misalnya dalam perjanjian jual beli dimana para pihak adalah kreditur dan juga debitur. Jadi bila ada penggantian salah satu pihak (baik debiturnya maupun krediturnya), maka akan terjadi penggantian debitur sekaligus juga penggantian kreditur. Oleh karena itu pembaharuan utang yang terjadi adalah pembaharuan utang / Novasi Subjektif aktif dan Subjektif pasif. Dalam Novasi ini, isi perjanjian tidak berubah, tetapi yang berubah adalah krediturnya.

Dari kata-kata "**mengambil alih**" dalam pasal 11 ayat (1) huruf b UUPT tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa para pendiri yang sebenarnya merupakan salah satu pihak dari perjanjian yang dibuatnya, sekarang telah dibebaskan dari perikatannya, dengan penggantinya adalah perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum itu. Oleh karenanya perbuatan

mengambil alih terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari para pendiri kepada perseroan, yaitu dari terikatnya pendiri atas perikatan yang dibuatnya itu sekarang yang terikat adalah hanya perseroan saja.

Selanjutnya dari pengertian kata "**menerima**" tidak menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan adanya pembaharuan utang melainkan adanya perluasan pihak perjanjian dengan masuknya perseroan terbatas sebagai pihak dalam perjanjian. Sedangkan pasal 11 ayat (1) huruf c yang menggunakan kata "**mengukuhkan**" perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, tetapi menimbulkan kekacauan hukum karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas sedangkan perseroan pada saat itu belum menjadi badan hukum. Pengertian kata mengukuhkan seakan-akan berarti sebenarnya perseroan "**terikat**" dengan perjanjian yang dikukuhkan itu tetapi perlu ketegasan atau pengukuhan dari perseroan untuk benar-benar sah mengikat perseroan tersebut.

Di sini terdapat kekacauan hukum, yaitu bagaimana mungkin suatu perseroan terbatas yang belum sah atau belum menjadi badan hukum melakukan perbuatan hukum ? Suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum adalah badan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi suatu

badan yang bukan badan hukum jelas tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 11 ayat (1) huruf c menyatakan bila perseroan terbatas yang telah mendapatkan status badan hukumnya mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas itu oleh para pendirinya pada waktu perseroan tersebut belum disahkan atau belum berstatus badan hukum. Bila perseroan terbatas belum disahkan berarti perseroan itu belum berstatus badan hukum dan berarti pula perseroan itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi bagaimana mungkin terdapat perbuatan hukum yang dapat mengatasnamakan perseroan terbatas.

Oleh karena itu, dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UUPT tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (*vide* pasal 11 ayat (2) UUPT) dari perbuatan hukum tersebut.

Pada dasarnya pengukuhan hanya dapat dilakukan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun dengan mengingat bahwa pada umumnya RUPS sulit atau tidak dapat langsung diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan,

maka undang-undang membuka kemungkinan bahwa pengukuhan tersebut juga dapat dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan pengurus perseroan secara bersama-sama tanpa melalui suatu RUPS. Oleh karenanya sebelum pengukuhan dilakukan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan ataupun karena perseroan tidak berkehendak untuk melakukan pengukuhan, maka perseroan sama sekali tidak terikat pada perbuatan-perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan tersebut (penjelasan pasal 11 ayat 2 UUPT).

Kemudian bagaimanakah pelaksanaan pasal 11 UUPT tersebut di dalam masyarakat ? Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengisian kuisisioner oleh 10 orang notaris di Pontianak, atas pelaksanaan pasal 11 ayat (1) UUPT dalam praktek kenotariatan menunjukkan bahwa, dalam praktek yang dihadapi para responden, seluruhnya tidak pernah mengkonstatir perubahan akta pendirian perseroan terbatas yang dalam Anggaran Dasarnya memuat penegasan bahwa menerima semua perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga dan tidak pernah mengkonstatir perubahan akta pendirian perseroan terbatas yang dalam Anggaran Dasarnya memuat penegasan bahwa mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang

dibuat pendiri atau pihak lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan.

Demikian pula dalam hal perubahan akta pendirian perseroan terbatas yang dalam Anggaran Dasarnya memuat penegasan bahwa **mengukuhkan** secara tertulis semua tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, juga tidak pernah dikonstatir oleh 10 orang notaris atau seluruh dari responden.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa, penerimaan, pengambilalihan atau pengukuhan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri perseroan – yang belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman – kepada institusi perseroan terbatas yang kemudian telah memperoleh pengesahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUPT dapat dikatakan tidak pernah terjadi di dalam praktek.

Selanjutnya mengenai pembebanan tanggung jawab hukum kepada para pendiri perseroan terbatas, apabila semua perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri perseroan sebelum perseroan disahkan sebagai-mana yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) UUPT, dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh 10 orang notaris di Pontianak selaku responden pada penelitian ini, bahwa seluruh responden menyatakan bahwa **setuju** apabila tidak dilakukannya penerimaan,

pengambilalihan, atau pengukuhan atas semua perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum perseroan disahkan, maka akibat hukum yang timbul atas semua perbuatan hukum tersebut adalah merupakan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan terbatas. Jadi para responden menyetujui adanya pasal 11 ayat (2) UUPT tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Sebelum Perseroan Terbatas Didaftarkan dan Diumumkan

Salah satu hal yang penting dalam proses pendirian perseroan terbatas baik pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan tersebut ke kantor Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domisili perseroan terbatas tersebut untuk didaftarkan dan kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian perseroan terbatas sudah didaftar pada buku register perseroan terbatas.

Kemudian dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka tempat pendaftaran yang diatur KUHD tersebut di atas yakni di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri telah diubah dengan Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perusahaan, yakni berada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota di mana perseroan terbatas itu berkedudukan.

Masalah yang timbul adalah bahwa, apabila kewajiban pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas tersebut, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 (UUPT) tidak dilaksanakan. Bagaimanakah tanggung jawab hukumnya apabila sebelum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman tersebut, telah terjadi hubungan hukum yang dilakukan oleh pendiri / pengurus perseroan yang mengakibatkan kerugian baik kepada pihak ketiga maupun pihak perseroan sendiri ? Hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni berdasarkan pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UPT-PUSTAK-UNDIP

a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Mengenai pendaftaran dan pengumuman akta pendirian perseroan terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengaturnya dalam pasal 38 ayat (2) dan (3) KUHD. Pendaftaran dan pengumuman untuk pertama kali pada saat perseroan didirikan diatur dalam pasal 38 ayat (2) KUHD, sedangkan pendaftaran dan pengumuman terhadap perubahan-perubahan akta pendirian dan perpanjangan waktu perseroan secara khusus diatur dalam pasal 38 ayat (3) KUHD.

Jika akta pendirian perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka seluruh akta pendirian seluruhnya harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana perseroan terbatas berkediaman. Adapun hal-hal yang didaftarkan adalah sebagai berikut :

1. akta pendirian perseroan terbatas termasuk Anggaran Dasarnya ;
2. surat keputusan Menteri Kehakiman tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tersebut.

Akta pendirian perseroan terbatas dan surat keputusan Menteri Kehakiman tersebut didaftar didalam "Daftar Umum" yang telah disediakan khusus untuk itu. Daftar tersebut bersifat "umum", artinya setiap orang dapat melihatnya dengan izin dan pengawasan, serta atas biaya sendiri dapat memperoleh

salinannya (*vide* pasal 38 ayat (4) KUHD *juncto* pasal 25 KUHD). Sesudah didaftarkan, Direksi membawa akta pendirian perseroan terbatas beserta surat keputusan Menteri Kehakiman dan bukti pendaftaran tersebut ke Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (*vide* pasal 38 ayat (2) KUHD)

Akibat hukum apakah yang akan timbul, apabila pendaftaran dan pengumuman yang dimaksud di atas belum dilaksanakan namun pendiri / pengurus perseroan terbatas telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatasnamakan perseroan ? Sebelum membahas lebih jauh permasalahan ini, kiranya ditinjau terlebih dahulu, bagaimanakah kapasitas pendiri/pengurus perseroan terbatas dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut dalam arti bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman itu secara juridis telah ada, artinya secara institusi telah dapat bertindak dalam hukum. Jadi perseroan terbatas dapat mengadakan perbuatan hukum. Namun, secara implisit dalam Kitab Undang Hukum Dagang diatur bahwa meskipun perseroan terbatas ini secara juridis telah ada, tetapi kalau belum didaftar dan diumumkan, maka belum berlaku bagi pihak ketiga. Dengan demikian, maka apabila belum

didaftar dan diumumkan, perseroan terbatas sebagai badan hukum belumlah berfungsi penuh. Oleh karena hal ini merupakan suatu kekurangan bagi kesempurnaan fungsi badan hukum baru itu, maka pembentuk undang-undang memberi sanksi sebagai tersebut dalam pasal 39 KUHD, yang berbunyi :

" Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka semua pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga."

Singkatnya bila sebuah perseroan terbatas itu belum didaftar dan diumumkan, maka masing-masing pengurusnya bertanggung-jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sama sekali tidak menjelaskan secara tegas mengenai kapan perseroan terbatas itu "lahir" atau memperoleh status badan hukum. Apakah telah diperoleh setelah akta pendirian perseroan disahkan oleh Menteri ataukah setelah diadakannya pendaftaran dan pengumuman ? Hal ini sangat penting sehubungan dengan kapasitas pengurus perseroan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan. Oleh karenanya, untuk memberikan jalan keluar atas kekosongan hukum tersebut, maka telah diakomodir dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi, yakni dalam

putusannya pada tanggal 21 Desember 1976 dengan Register **Nomor. 297K/Sip/1974**, yang menyatakan : ⁵⁷

"Bahwa belum diumumkankannya perseroan terbatas dalam Berita Negara, tidaklah berarti bahwa perseroan terbatas belum merupakan badan hukum melainkan pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.v.K. dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa perseroan tersebut tidak mempunyai "persona standi in judicio"

Menanggapi kasus tersebut, **Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama**, memberikan komentar sebagai berikut : ⁵⁸

Putusan Mahkamah Agung ini menarik perhatian dalam perkara ini. Yang merupakan persoalan adalah apakah status badan hukum diperoleh oleh suatu perseroan terbatas setelah ada pengumuman dalam Berita Negara dan ada pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya ? Hal ini yang telah dijadikan salah satu keberatan oleh Pemohon kasasi, yang menyatakan bahwa "PT. Panca Mitra hingga kini belum juga didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukannya dan belum diumumkan dalam Berita Negara, sebagai disyaratkan oleh pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka oleh karena PT. Panca Mega tersebut belum merupakan badan hukum menurut hukum Indonesia".

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 1997*, (Jakarta : dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, tahun 1999), halaman 75.

⁵⁸ Sudargo Gautama, Prof., Mr., Dr., S.H., *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (landmark Decisions) berikut komentar Jilid 4*, cetakan ke-1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 365 – 367.

Lalu persoalan yang harus ditegaskan oleh Mahkamah Agung adalah apakah memang pengumuman dalam Berita Negara dan pendaftaran dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri itu merupakan syarat untuk memperoleh status badan hukum ini.

Ternyata Mahkamah Agung tidak berpendirian demikian, karena dikemukakan bahwa keberatan bersangkutan ini tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, pula seandainya benar PT. Panca Mitra belum diumumkan dalam Berita Negara, "namun hal ini tidak berarti bahwa perseroan terbatas tersebut belum merupakan badan hukum melainkan hanya pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 WvK, hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa perseroan tersebut tidak mempunyai "**persona standi in judicio**". Jadi Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu perseroan terbatas bisa digugat sebagai badan hukum apabila sudah didirikan dan telah disetujui Anggaran Dasarnya oleh Menteri Kehakiman. Walaupun belum ada pengumuman dalam Berita Negara dan belum ada pencatatan dalam kantor Panitera Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan bersangkutan itu, sudah dapat digugat perseroan terbatas bersangkutan sebagai suatu "**perseroan tersendiri**".

Dengan demikian Mahkamah Agung telah memilih sikap dalam suatu perbedaan paham yang agak kontraversial. Dalam praktek diketahui bahwa Dirjen Perundang-undangan Departemen Kehakiman telah menganut pendirian, bahwa status badan hukum sudah diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri

Kehakiman, sedangkan ada perbedaan pendapat lain yang mengatakan baru status badan hukum ini diperoleh karena adanya pengumuman dalam Berita Negara dan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Setiap jabatan apapun pasti memiliki tugas dan kewajiban serta wewenangnya masing-masing. Dengan demikian, sudah barang tentu tugas dan kewajiban serta wewenang itu harus dilaksanakan dengan baik oleh "siapa" yang telah diserahkan tanggung jawab tersebut. Apabila tugas dan kewajiban itu dilalaikan atau wewenang jabatan itu telah disalahgunakan, maka akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang melalaikannya. Pejabat tersebut haruslah bertanggung jawab atas kelalaiannya atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula halnya dengan jabatan Direksi dari suatu perseroan terbatas. Dengan menjadi Direksi berarti telah menduduki suatu jabatan, oleh karenanya orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila tugas dan kewajibannya dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, maka bagaimanakah dengan institusi badan hukum perseroaan itu sendiri untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah

dilakukan dengan perantaraannya, dalam hal ini Direksi perseroan?

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum. Status badan hukum dari perseroan terbatas diperoleh pada saat akta pendirian dari perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman. Terhitung sejak saat pengesahan, para pendiri perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara *tidak terbatas* atas tiap perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, dan hanya akan menanggung kerugian yang terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) UUPT. Selanjutnya, selama pengesahan tersebut belum diperoleh, maka para pendiri (dan sekaligus pengurusnya) bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Demikian pula apabila perseroan yang telah memperoleh pengesahan namun belum didaftar dan diumumkan, maka yang akan memberikan pertanggungjawaban secara tanggung renteng adalah Direksi perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya apabila dibandingkan dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHD.

Di antara hal-hal tersebut, yang menarik adalah mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Direksi perseroan. Dari sekian banyak kewajiban tersebut, hal "pendaftaran" dan "pengumuman" perseroan, adalah merupakan dua kewajiban penting yang harus dilakukan sebelum perseroan itu secara serius untuk menjalankan usahanya.

Pengaturan tentang hal tersebut dapat dilihat pada Bab II, Bagian Ketiga, pasal 21 – 23 dalam UUPT, yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran dan pengumuman perseroan serta bagaimana pertanggung-jawabannya apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : ⁵⁹

Pasal 21 :

(1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6);*
- b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ayat (2); atau*
- c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).*

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, op cit, halaman 09.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Penjelasan Pasal 21 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Daftar Perusahaan" adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22 :

- (1) Perseroan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 22 :

Cukup Jelas.

Pasal 23 :

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 23 :

Selain sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 tidak dipenuhi.

Sebagaimana hal yang diatur dalam pasal 21 dan 22 UUPT di atas, dapat dipahami bahwa pendaftaran dan pengumuman suatu perseroan, baru dapat dilakukan setelah perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Dengan perkataan lain, pendaftaran dan pengumuman perseroan hanya dapat dilakukan setelah perseroan terbatas telah memperoleh status badan hukum (*legal entity*).

Mengenai ketegasan kapan diperolehnya status badan hukum bagi perseroan terbatas, dapat ditemukan pada pasal 7 ayat (6) UUPT, yang berbunyi : ⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, Bab II, Bagian Pertama, pasal 7 ayat (6), halaman 04.

Pasal 7 :

- (1) *Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.*

Berbeda dengan pada waktu berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mana dalam KUHD tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara tegas mengenai kapan perseroan terbatas itu "lahir" atau memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan jalan keluar atas kekosongan hukum tersebut, maka telah diakomodir dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi, yakni dalam putusannya pada tanggal 21 Desember 1976 dengan Register Nomor. 297K/Sip/1974, yang menyatakan : ⁶¹

"Bahwa belum diumumkankannya perseroan terbatas dalam Berita Negara, tidaklah berarti bahwa perseroan terbatas belum merupakan badan hukum melainkan pertanggungjawabnya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 W.v.K. dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa perseroan tersebut tidak mempunyai "persona standi in judicio"

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 1997*, (Jakarta : dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, tahun 1999), halaman 75.

Banyak hal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) – yang diundangkan pada 07 Maret 1995 – masih perlu diulas dalam rangka penerapannya di dalam masyarakat. Antara lain yang perlu disimak dan diulas adalah mengenai *tanggung jawab* Direksi dan institusi perseroan itu sendiri, atas perbuatan hukum yang dilakukan *sebelum* perseroan tersebut didaftarkan dan diumumkan sebagaimana yang diatur dalam UUPT tersebut.

Membahas mengenai tanggung jawab perdata Direksi dan institusi perseroan, harus dilakukan dengan meneliti bagaimana tanggung jawab tersebut di atur, yang mana ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa ;

"selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan".

Masalah yang timbul di sini adalah apakah maksud pembuat UUPT dalam pasal 23 tersebut yang menyatakan bahwa *"selama belum didaftar dan diumumkan ..."* ? Apakah hal ini berarti bahwa apabila belum didaftar **dan** diumumkan – maksudnya harus memenuhi *kedua* persyaratan tersebut – maka tanggung jawab Direksi adalah secara tanggung renteng ?

Kemudian apabila kedua persyaratan di atas *hanya* dipenuhi salah satunya, maka Direksi tidak dibebani tanggung jawab renteng tersebut ?

Dengan melihat redaksi dari pasal 23 UUPT tersebut yang memakai kata penghubung "**dan**", maka secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa, Direksi baru mempunyai tanggung jawab renteng atas perbuatan perseroan apabila akta pendirian perseroan yang telah disahkan Menteri belum didaftarkan maupun diumumkan, artinya harus memenuhi kedua syarat yakni "*pendaftaran*" dan "*pengumuman*". Tetapi kalau yang dimaksud apabila telah didaftar tetapi belum diumumkan berlaku juga tanggung jawab renteng, maka 'redaksi' pada pasal 23 itu harus memakai kata penghubung "**dan / atau**" bukan hanya kata "**dan**" saja.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan pasal 7 ayat (6) *juncto* pasal 3 ayat (1) UUPT yang merupakan dasar hukum tentang modal yang menjadi jaminan atas perikatan perseroan terbatas atau dengan kata lain merupakan ketentuan tentang modal dari perseroan terbatas yang telah berstatus badan hukum, yang berjumlah sebesar saham yang telah diambil atau sebesar modal yang ditempatkan. Pasal 3 (1) UUPT ini menetapkan tentang pertanggungjawaban yang terbatas (*limited liability*) dari pemegang saham atas perikatan yang dibuat atas

nama perseroan. Hanya saja pasal 3 (1) UUPT tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang perikatan dari perseroan dalam keadaan yang bagaimana, maksudnya apakah perseroan yang telah didaftarkan dan diumumkan atau perseroan yang belum didaftar dan diumumkan ? Keadaan demikian apabila ditelaah dalam pasal 7 ayat (6) UUPT, yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu perseroan telah mempunyai status badan hukum artinya mempunyai harta kekayaan yang terpisah, adalah pada saat perseroan itu setelah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman, maka sangat jelas bahwa pertanggungjawaban yang terbatas itu adalah untuk perikatan yang dibuat oleh Direksi sebagai organ dari perseroan yang minimal telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, dengan demikian *termasuk* pula untuk kondisi perseroan yang belum didaftarkan dan diumumkan.

Menyimak pada pasal 3 ayat (1) UUPT yang menetapkan pertanggungjawaban dari pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan sejak perseroan telah disahkan *termasuk* juga perseroan yang belum didaftar dan diumumkan, serta berhubungan dengan pasal 23 UUPT yang juga mengatur tentang adanya pertanggung jawaban Direksi perseroan secara tanggung renteng atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang belum didaftar dan diumumkan, maka

masalahnya sekarang adalah modal manakah yang dijadikan jaminan atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sebelum didaftarkan dan diumumkan tersebut? Hal ini akan menimbulkan suatu pertentangan kepentingan, apakah modal yang menjadi jaminan atas perikatan yang dilakukan perseroan sebelum didaftar dan diumumkan adalah hanya saham yang telah diambil oleh pemegang saham saja ataukah modal pribadi para Direksi secara tanggung renteng ataukah kedua-duanya ?

Kalau pertanggungjawaban atas perikatan perseroan yang dilakukan sebelum didaftar dan diumumkan hanya ditetapkan sebesar apa yang secara *gramatikal* ditafsirkan dari pasal 23 UUPT, yakni semata-mata hanya modal pribadi Direksi secara tanggung renteng saja yang menjadi jaminan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka dengan demikian pihak ketiga atau kreditur perseroan yang beritikad baik jelas akan dirugikan, karena kemungkinan besar modal Direksi yang secara logis adalah kebanyakan orang-orang yang hanya merupakan tenaga-tenaga profesional itu, memiliki modal yang lebih kecil jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh para pemodal yang secara khusus menempatkan modalnya untuk mendirikan perseroan tersebut. Keadaan ini juga sangat merugikan Direksi perseroan, sebab bukankah dalam hal melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan adalah untuk kepentingan institusi

perseroan ? Kenapa hanya Direksi saja secara tanggung renteng yang bertanggung jawab ? Apabila pasal 23 UUPT tersebut diberlakukan sebagaimana apa adanya, maka suatu ketidakadilan akan muncul kepermukaan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka menurut hemat penulis sangat tidaklah adil rasanya apabila perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan hanya dijamin oleh modal pribadi dari Direksi perseroan secara tanggung renteng. Tetapi akan dirasakan sangat adil apabila modal yang menjadi jaminan atas perbuatan hukum itu dijamin adalah modal yang telah ditempatkan berdasarkan pasal 3 UUPT yang mana merupakan kekayaan badan hukum yang terpisah, dan apabila kekayaan tersebut tidak mencukupi untuk menanggung kerugian kepada pihak ketiga, maka akan ditambah dengan modal pribadi dari Direksi secara tanggung renteng.

Kemudian masalah lain akan timbul lagi, apabila penerapan pasal 23 UUPT dilaksanakan dalam keadaan dimana perseroan terbatas yang telah melakukan "perubahan Anggaran Dasar perseroan", namun belum melakukan pendaftaran dan pengumuman. Hal ini akan timbul karena Pasal 23 UUPT menyatakan bahwa *"selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 belum dilakukan,*

maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Apabila diteliti lebih lanjut bunyi pasal 21 dan 22 UUPT tersebut yang dihubungkan dengan pasal 23 UUPT, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk pendaftaran dan pengumuman yang dimaksud pasal 23 tersebut tidak hanya mencakup "akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman" saja, namun berdasarkan ayat (2) dari pasal 21 UUPT juga mencakup "akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), serta mencakup juga "akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3). Lalu apakah selama perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas belum didaftarkan dan diumumkan, maka Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng tanpa melibatkan pertanggungjawaban institusi perseroan, yang sebenarnya pada saat proses perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memperoleh status badan hukum dimana telah mempunyai kekayaan tersendiri ? Bila melihat bunyi redaksi dari pasal 23 UUPT tersebut, jawaban atas pertanyaan di atas adalah "Ya", artinya hanya Direksi perseroan saja yang bertanggung jawab secara tanggung renteng tanpa

melibatkan institusi badan hukum perseroan atas perbuatan hukum perseroan dalam keadaan dimana akta perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dan (3) belum diadakan pendaftaran dan pengumuman.

Sebenarnya pengaturan tentang ikut sertanya institusi perseroan terbatas disamping tanggung jawab Direksi perseroan secara renteng untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan didaftarkan dan diumumkan, telah disampaikan oleh para pakar hukum kita pada saat membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang disusun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) – merupakan satu lembaga yang dibentuk pada tahun 1961 berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang di dalamnya memuat juga ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan pembinaan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Ketetapan MPRS tersebut.⁶² Adapun pasal-pasal dalam RUU KUHD tersebut, yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran dan pengumuman perseroan serta bagaimana pertanggungjawabannya apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, dapat dilihat pada hasil penelitian di atas, yakni

⁶² Wantjik Saleh. K., S.H., *Seminar Hukum Nasional 1963 – 1979*, cetakan pertama, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1980), halaman 6.

pada pasal 68 tentang kewajiban pendaftaran perseroan, pasal 70 tentang kewajiban pengumuman perseroan dan pasal 71 tentang bagaimana pertanggung-jawabannya apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 68 dan pasal 70 dari RUU KUHD tersebut.

Yang menarik perhatian adalah bahwa pertanggung-jawaban yang dimaksud pasal 71 RUU KUHD tersebut telah memberikan suatu pandangan yang cukup maju apabila dibandingkan dengan pasal 23 UUPT yang sekarang sedang berlaku. Adapun pandangan tersebut adalah bahwa, pasal 71 telah memberikan suatu terobosan yang baik atas perkembangan hukum, yang mana sebelumnya dalam KUHD (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23*), khususnya pasal 39 *W.v.K.* juga tidak secara eksplisit menegaskan adanya pertanggungjawaban dari institusi badan hukum perseroan terbatas atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan sebelum didaftarkan dan diumumkan. Karena dalam pasal 39 *W.v.K.* maupun pasal 23 UUPT hanya menegaskan adanya tanggungjawab Direksi secara tanggung renteng *tanpa melibatkan* institusi badan hukum perseroan untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan yang belum didaftarkan dan diumumkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kedudukan Direksi suatu perusahaan terbatas cukup sentral dan penting. Baik dalam *Civil Law System* yang merupakan sumber utama bagi hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam *Common Law System* pada pihak lainnya, yang pada kondisi tertentu kedua sistem hukum tersebut akan tercipta suatu "sinergi" yang saling berpengaruh dalam penerapan hukum di Indonesia.

Karena berasal dari dua pandangan maupun tradisi yang berbeda, maka tanggung jawab Direksi dalam tatanan hukum perusahaan tentulah berbeda pula, baik secara filsafati, teori bahkan sampai pada hal-hal yang sangat detail di dalam implikasinya.

Dalam perjalanan pembentukan UUPT yang sering dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam UUPT tersebut adalah merupakan hal-hal yang "baru" – artinya belum pernah ada sebelumnya baik dalam KUHD maupun penerapannya di dalam praktek – sebenarnya tidak lain berasal dari ketentuan-ketentuan asing yang berlaku pada negara-negara barat yang menganut *common law system* yang diadopsi ke dalam UUPT yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Hal yang menarik adalah bahwa, dengan dimasukkannya doktrin-doktrin yang berasal dari luar itu – yang berasal

dari apa yang dipraktekkan dalam peradilan negara-negara yang menganut *common law system*, misalnya Inggris dan Amerika Serikat – ke dalam UUPT, dan sementara itu apa yang ada dalam KUHD yang secara notabene berasal dari hukum Eropa Kontinental pada umumnya, juga masih tetap eksis dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUPT tersebut. Dalam kondisi demikian, maka sangatlah terasa bahwa seolah-olah terdapat hal-hal yang sepertinya dipaksakan untuk diadopsikan ke dalam UUPT, yang mana sumber utama dari tatanan hukumnya berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, maka pada saat penerapan undang-undang tersebut (UUPT) sangatlah berpotensi untuk menimbulkan benturan-benturan yang nantinya akan menyulitkan bagi masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat (6) UUPT, pada prinsipnya pertanggungjawaban Direksi adalah menjadi terbatas setelah perseroan memperoleh status badan hukum, yang mana dengan diperolehnya status tersebut, maka telah terjadi adanya suatu harta kekayaan tersendiri yang merupakan jaminan bagi pihak ketiga atas segala hutang perseroan sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas atau

menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi, apabila perseroan tersebut walaupun telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, namun belum didaftar dan diumumkan sesuai dengan pasal 21 dan 22 UUPT.

Tanggung jawab tidak terbatas tersebut muncul kembali, dengan diberlakukannya beberapa doktrin hukum yang berasal dari *common law system* pada UUPT, diantaranya adalah doktrin *Piercing The Corporate Veil*. Kata "*piercing*" berarti menembus atau mengoyak, sementara kata "*veil*" berarti kerudung atau cadar. Oleh karena itu, maka ungkapan *piercing the corporate veil* secara harfiah dapat diartikan bahwa "cadar badan hukum yang dikoyak atau ditembusi"⁶³. Dalam penerapannya ke dalam ilmu hukum perseroan, doktrin ini mengajarkan bahwa, hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta benda pemegang saham, Direksi, bahkan komisaris. Sungguhpun secara *de jure* seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan terbatas untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Jadi cadar yang membatasi badan hukum dengan pemegang saham, Direksi dan komisaris tersebut dapat dikoyak.

⁶³ Bandingkan : Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 7 – 8.

Dengan perkataan lain bahwa, *Piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang mengajarkan tentang hal sesungguhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh dan untuk nama perseroan, dimana pembebanan tanggung jawabnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa "cadar" badan hukum dari perusahaan yang membatasi tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu dapat ditembusi/dirobek (*piercing*). Sedangkan dalam *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*,⁶⁴ yang dimaksudkan dengan *piercing the corporate veil* adalah sebagai "suatu doktrin dalam hukum perusahaan yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu perusahaan sebagai suatu badan hukum dapat dikesampingkan, khususnya bila menyangkut kelompok-kelompok perusahaan, akibatnya tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dari perusahaan dapat dimintakan dari para pemegang sahamnya, Direksi dan tanggung jawab perusahaan induk terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya, meskipun sesungguhnya kedua perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang terpisah".

Ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sampai batas-batas tertentu telah mengakui berlakunya

⁶⁴ Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, edisi pertama, (Jakarta : Penerbit Proyek ELIPS, 1997), halaman 129.

doktrin *piercing the corporate veil*, sungguhpun pengaturannya terasa masih sederhana. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, penerapan doktrin tersebut ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia telah berbentuk badan hukum), tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya, bahkan dalam perkembangan-nya penerapan hal tersebut juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan komisaris.

Salah satu tanggung jawab Direksi akibat dari penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tersebut, adalah dalam hal dimana perusahaan belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu, bahwa suatu perusahaan sudah menjadi badan hukum sejak disahkan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Kehakiman. Namun demikian, dengan adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut, sungguhpun badan hukumnya sudah eksis, tetapi badan hukum tersebut belum berlaku kepada pihak ketiga sebelum perusahaan tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara. Oleh karena itu, sebelum pendaftaran dan pengumuman dan walaupun Anggaran Dasarnya telah disahkan, maka yang

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan bukanlah pihak perseroan tersebut dan bukan pula pemegang saham, melainkan yang bertanggung jawab adalah Direksi yang bersangkutan, berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* (sebagaimana yang di atur dalam pasal 23 UUPT).

Sebagai perbandingan serta untuk memperluas pembahasan dalam penulisan ini, maka juga akan dibahas sedikit tentang pengaturan hal tersebut di dalam hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang sebelumnya juga merupakan sumber utama bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila diteliti lebih jauh dalam Buku II baru B.W. Belanda, khususnya Titel 3 dan 4 yang mengatur tentang hukum perseroan, dan jika diperbandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, maka dapat ditemukan perbedaan-perbedaan yang cukup menarik untuk disimak.

Sebelum membahas tentang tanggung jawab Direksi sebelum perseroan didaftarkan dan diumumkan, ada baiknya dilihat terlebih dahulu bagaimana proses atau tahap-tahap pendirian sebuah perseroan terbatas berdasarkan hukum perseroan Belanda, yang dimulai dengan pembuatan akta notaris yang dilakukan oleh para pendiri atau yang dikuasakan untuk itu di hadapan notaris sampai dengan proses pendaftaran

dan pengumuman perseroan oleh Direksi perseroan. Menurut hukum perseroan Belanda yang diatur dalam Buku II (baru) B.W. Belanda, yang cukup menarik untuk dibahas adalah pada tahap proses untuk mendapatkan "keterangan tidak keberatan" dari Menteri Kehakiman. Pada pasal 68 ayat (2) Buku II (baru) B.W. Belanda, memberikan rincian yang tegas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan keterangan tidak keberatan oleh Menteri Kehakiman. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut : ⁶⁵

1. bahwa dengan memperhatikan tujuan serta latar belakang orang-orang yang menentukan atau ikut menentukan kebijaksanaan perseroan, terdapat ancaman bahaya ;
2. bahwa perseroan akan digunakan untuk usaha-usaha yang dilarang atau kegiatannya akan merugikan pihak yang berpiutang ;
3. bahwa akta bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum atau undang-undang ;
4. bahwa tidak terbukti, para pendiri bersama-sama ikut serta dalam modal perseroan untuk paling sedikit seperlima bagian.

Dari asas-asas yang terdapat pada pasal 68 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa, dalam proses pendirian suatu

⁶⁵ Rochmat Soemitro.H., Prof.,DR.,S.H., *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Eresco, 1993) halaman 181.

perseroan terbatas, pendiri perseroan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan tidak keberatan dari Menteri Kehakiman, tetapi bukan halnya untuk memperoleh status badan hukum atas pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (6) UUPT. Di samping itu, alasan-alasan penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan yang diajukan oleh pendiri perseroan terbatas di Indonesia, tidak dirinci secara tegas di dalam undang-undang, namun hanya dinyatakan bahwa dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 9 UUPT – maksudnya dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat (3) UUPT).

Kemudian mengenai kapan status badan hukum suatu perseroan terbatas diperoleh, tidak dinyatakan secara tegas dalam hukum perseroan Belanda, hanya secara implisit dinyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses pendirian suatu perseroan, maka melalui keputusan hakim dengan adanya tuntutan jaksa perseroan dapat dibubarkan. Pernyataan tentang "*.....dapat dibubarkan*", menunjukkan bahwa, suatu perseroan yang didirikan dengan kekurangan-kekurangan – artinya tidak memenuhi syarat-syarat

yang diwajibkan – seperti pendaftaran dan pengumuman, meletakkan sebuah akta pendirian otentik di kantor register dagang, atau belum dilakukannya penyeteran sekurang-kurangnya sepuluh perseratus dari jumlah saham yang ditempatkan pada saat pendirian, perseroan tersebut telah diakui sah menurut hukum. Dengan demikian status badan hukum perseroan terbatas di Belanda dianggap telah ada sejak dibuatnya akta pendiriannya di hadapan notaris dan telah mendapatkan keterangan tidak keberatan dari Menteri Kehakiman. Tidak demikian halnya dalam UUPT, status badan hukum perseroan terbatas telah dinyatakan secara tegas pada pasal 7 ayat (6) undang-undang ini bahwa, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UUPT disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Dalam pandangan yang demikian, maka bagaimanakah tanggung jawab Direksi apabila perseroan terbatas yang telah didirikan tersebut belum dilakukan pendaftaran maupun pengumuman ? Hal tersebut diatur pada hukum perseroan Belanda, di dalam pasal 69 Buku II (baru) B.W. Belanda, yang menyatakan bahwa, *"selama pendaftaran dan peletakan akta belum dilakukan dan sekurang-kurangnya sepuluh perseratus dari jumlah setiap saham yang ditempatkan pada pendirian,*

maka setiap anggota pengurus di samping perseroan bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya untuk perseroan".

Dari bunyi redaksi pasal 69 tersebut di atas, "....., setiap anggota pengurus **disamping** perseroan bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum", maka dapat dipahami bahwa, dalam hukum perseroan Belanda secara tegas menyatakan adanya *tanggung jawab perseroan* disamping tanggung jawab renteng dari anggota pengurus atas kelalaiannya untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman perseroan. Hal demikian tidak didapatkan pada UUPT yang mengatur hal tersebut, dimana dalam pasal 23 UUPT hanya mencantumkan tanggung jawab renteng Direksi selaku pengurus perseroan untuk bertanggung jawab atas tidak dilakukannya pendaftaran dan pengumuman perseroan, tanpa melibatkan badan hukum perseroan – yang mana secara tegas telah diperoleh berdasarkan pasal 7 ayat (6) UUPT – untuk ikut bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Masalah inilah yang merupakan pokok perhatian di dalam melakukan penelitian ini, yang mana menurut hemat penulis, tanggung jawab yang timbul atas segala perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atas nama perseroan terbatas yang

telah memperoleh status badan hukum, hendaknya dibebani juga kepada institusi badan hukum perseroan **bersama-sama** dengan anggota pengurus perseroan secara tanggung renteng.

3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Setelah Perseroan Terbatas Didaftar dan Diumumkan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara implisit mengatur bahwa untuk sahnya suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum yang sempurna, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dibuat dalam bentuk otentik (pasal 38 KUHD) ;
- b. mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (pasal 36 KUHD) ;
- c. didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan
- d. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (pasal 38 KUHD).

Keempat hal ini merupakan syarat mutlak untuk membentuk sebuah Perseroan Terbatas sehingga menjadi suatu badan hukum yang sah dan sempurna.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa, perolehan status badan hukum suatu Perseroan Terbatas setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman (pasal 7 ayat 6 UUPT).

Apabila suatu perseroan terbatas telah memenuhi semua syarat-syarat pendirian terakhir dengan diadakannya pendaftaran dan pengumuman atas perseroan tersebut, maka bagaimanakah tanggung jawab hukum pengurus – dalam hal ini Direksi – untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama perseroan ? Hal ini akan dibahas dari sudut pandang yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

a. Pada Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Apabila ingin menelaah tentang bagaimana tanggung jawab pengurus perseroan terbatas setelah perseroan didaftar dan diumumkan, maka seyogianya perlu menyimak bagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam pasal 44 undang-undang ini dinyatakan :

" Perseroan diurus oleh pengurus yang terdiri dari anggota perseroan atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan atau tidak dengan merima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan komisaris."

Selanjutnya, dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan :

"Pengurus-pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan, mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan."

Yang dimaksud dengan pengurus di sini dalam istilah populernya sehari-hari lebih biasa dikenal untuk lembaganya sebagai Direksi atau untuk orang-orangnya disebut sebagai Direktur. Singkatnya dalam pasal 44 KUHD tersebut dinyatakan pihak pengurus tersebut adalah orang atau orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peran "mengurus" perseroan.

Pasal 44 KUHD tidak secara tegas merumuskan apa yang sebenarnya menjadi tugas dari pengurus, akan tetapi jelas kiranya manakala menyimak kepada apa yang pada umumnya dirumuskan dalam Anggaran Dasar dari perseroan terbatas yang ada. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar, Direksilah yang ditunjuk untuk menjalankan segala perbuatan/ tindakan untuk perseroan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan demikian pula dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dalam segala hal dan kejadian, yang kemudian ditentukan dengan batasan-batasan sepanjang dalam batas-batas "tujuan" perseroan serta dalam beberapa hal tertentu

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari organ lain tertentu dalam perseroan terbatas atau ikut sertanya organ lain dalam perbuatan tersebut.

Dalam pasal 45 KUHD tersebut dinyatakan bahwa *"tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya....."* Apa yang dimaksud dengan kalimat *"menunaikan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya"* ? Menurut penulis, arti kalimat tersebut kiranya dalam hal ini dapat dikembalikan kepada asas hukum yang berlaku umum yang diperkenalkan sebagai asas apakah Direksi telah menjalankan tugasnya *"secara pantas"*. Kemudian apakah ukurannya untuk menyatakan Direksi telah *"pantas"* atau *"tidak pantas"* menjalankan pengurusannya ? Hal ini perlu diperlukan suatu pendekatan manajemen, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Direksi itu telah sesuai dengan tujuan manajemen ataukah belum. Dalam hal ini, perlu disimak lagi adalah bahwa di dalam menjalankan manajemen yang baik / pantas itu harus juga dilihat untuk kepentingan siapa. Artinya bukan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata, melainkan harus juga mengutamakan kepentingan perusahaan.

Selama ini menurut Kitab Undang Hukum Dagang, setidak-tidaknya menurut pandangan para sarjana kita,

perseroan hanyalah terikat kepada pihak ketiga, demikian bertanggung jawab sepanjang Direksi dalam melakukan perbuatan itu telah memenuhi ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan. Demikian perseroan menjadi tidak terikat dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi, makanya ternyata Direksi dalam menjalankan perbuatan itu telah melampaui wewenangnya (pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) KUHD). Dalam keadaan yang demikian, maka menjadilah suatu kewajiban bagi pihak ketiga untuk harus selalu meneliti dan waspada dalam hal berhubungan dengan pihak Direksi suatu perseroan terbatas, apakah Direksi tersebut melampaui atau tidak terhadap wewenang yang dimilikinya. Menurut pandangan penulis, hal tersebut dirasakan tidak pantas dan tidak adil, jika terhadap pihak ketiga itu dibebani kewajiban "seharusnya" mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi itu sebagai perbuatan melampaui wewenangnya, sehingga menjadikan perseroan tidak bertanggung jawab dan dipersilahkan pihak ketiga untuk menuntut kerugian kepada Direksi (direktur) secara pribadi. Padahal Direksi suatu perseroan tidak semuanya dijabat oleh pemegang saham perseroan, melainkan cenderung dijabat oleh seorang "*profesional manager*" yang besar kemungkinan tidak

mempunyai harta kekayaan yang memadai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Tugas dan tanggung jawab Direksi perseroan terbatas yang telah melakukan pendaftaran dan pengumuman perseroan pada umumnya dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Apakah tugas dan tanggung jawab Direksi suatu perseroan terbatas menurut UUPT ? Pasal 79 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Selanjutnya menurut pasal 82 UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari pasal 82 UUPT itu dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Dengan kata lain, bahwa Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan

yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan, atau bertentangan dengan tujuan perseroan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 82 UUPT, oleh pasal 85 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu perseroan atau perseroan terbatas. Apakah sanksinya bila tugas anggota Direksi itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) UUPT ? Menurut pasal 85 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) UUPT itu.

Demikian juga dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu (pasal 90 ayat (2) UUPT).

Kata "Direksi" dalam pasal 90 ayat (2) UUPT menunjukkan bahwa semua anggota Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama. Hanya saja selama ini seolah-olah

di dalam praktik ada perbedaan tanggung jawab antara direktur yang satu dengan direktur yang lainnya. Hal ini dilihat dari pemberian nama jabatan Direktur di dalam suatu perseroan, kadang kala terdapat sebutan atau pemberian yang beragam antara Direktur yang satu dengan yang lainnya, misalnya sebutan *Managing Director* dan *Executive Director*. Dari pemberian nama ini seolah-olah ada pengkhususan dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga tanggung jawab pengurusan juga berbeda. Misalnya Direktur Operasional sepertinya hanya bertanggung jawab di bidang operasional, sedangkan *Managing Director* bertanggung jawab lebih luas karena berkaitan dengan pengelolaan perseroan dan demikian juga dengan anggota Direksi lainnya sesuai dengan penamaan jabatannya, seperti Direktur Personalia dan Direktur Pemasaran.

Berkenaan dengan hal ini, pada sebagian perseroan, pembagian tugas para direktur tidak dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan. Dalam hal ini para notaris tetap berpegang pada tanggung jawab direktur yang bersifat kolegal, sama juga halnya dalam pasal 83 ayat (1) UUPT yang menyebutkan :

" Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar".

Demikian, yang diberi wewenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, yang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa undang-undang ini memilih sistem kolegal, artinya yang bertindak sebagai wakil adalah Direksi, bukan perseorangan anggota Direksi melainkan Direksi sebagai organ. Jadi tanggung jawab itu tetap ada pada Direksi sebagai organ.

Dalam pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan :

" Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu ".

Tanggung renteng artinya adalah menanggung secara bersama-sama atas biaya atau utang yang harus dibayar. Bagaimana halnya apabila di antara anggota Direksi tersebut ada yang merasa tidak bersalah ? Terhadap hal ini, undang-undang memberikan ketentuan yang jelas bahwa apabila memang dapat dibuktikan kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang bersangkutan, ia tidak bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut (vide pasal 90 ayat (3) UUPT).

Demikian secara garis besar tentang tugas dan tanggung jawab Direksi selaku organ perseroan terbatas setelah perseroan didaftar dan diumumkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga permasalahan pokok pada penelitian ini, dapat penulis kemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Hukum Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Memperoleh Pengesahan.

a. Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847 : 23) – berlaku sejak 01 Mei 1848 – khususnya pasal 36 s/d 56 yang mengatur tentang perseroan terbatas, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur tentang bagaimana tanggung jawab pendiri perseroan terbatas sebelum perseroan tersebut memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman ;
- 2) Namun secara implisit, tanggung jawab hukum pendiri perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, tersirat dalam pasal 37 ayat (4) KUHD yang menyatakan bahwa dengan persetujuan Mahkamah Agung perseroan terbatas dapat dibubarkan manakala para pengurusnya (pendiri) lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Anggaran Dasar.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995

- 1) Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 yang berlaku sejak 07 Maret 1996, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pendiri perseroan terbatas yang perseroannya belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, yakni pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ini, yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak *diterima*, tidak *diambil alih*, atau tidak *dikukuhkan* oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul ;
- 2) Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa *penerimaan*, *pengambilalihan*, atau *pengukuhan* atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri perseroan – yang belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman – kepada Institusi perseroan terbatas yang kemudian telah memperoleh pengesahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUPT, dapat dikatakan *tidak pernah* terjadi di dalam praktek.

2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Sebelum Perseroan Terbatas Didaftarkan dan Diumumkan.

a. Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tanggung jawab hukum Direksi perseroan terbatas sebelum

perseroannya didaftar dan diumumkan diatur dalam pasal 39 KUHD yang menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal-pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka semua pengurusnya adalah *orang demi orang* dan *masing-masing* bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum. Status badan hukum dari perseroan terbatas diperoleh pada saat akta pendirian dari perseroan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman. Terhitung sejak saat pengesahan, para pendiri perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara "tidak terbatas" atau tiap perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, dan hanya akan menanggung kerugian yang terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 2) Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar ;
- 3) Pada masa berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, tanggung jawab hukum Direksi sebelum perseroan terbatas didaftar dan diumumkan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang

ini yang menyatakan bahwa selama *pendaftaran* dan *pengumuman* belum dilakukan, maka Direksi secara *tanggung renteng* bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, dengan pengertian bahwa perseroan terbatas yang telah berstatus badan hukum tidak ikut bertanggung jawab ;

- 4) Sangatlah "tidak adil" apabila tanggung jawab hukum Direksi perseroan terbatas yang perseroannya belum didaftar dan diumumkan sebagaimana – secara *gramatikal* – yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi adalah merupakan tanggung jawab Direksi secara renteng dengan **tidak** melibatkan Institusi badan hukum perseroan terbatas untuk ikut bertanggung jawab ;
- 5) Kewajiban untuk pendaftaran dan pengumuman yang dimaksud pasal 23 – *juncto* 21 dan 22 – Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 tidak hanya mencakup akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman saja, tetapi juga mencakup akta perubahan Anggaran Dasar beserta *surat persetujuan* Menteri, serta mencakup pula akta perubahan Anggaran Dasar beserta *laporan* kepada Menteri Kehakiman ;

6) Dalam perjalanan pembentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, sampai batas-batas tertentu telah mengakui berlakunya doktrin *piercing the corporate veil* yang berasal dari *common law system*, yang memberikan pengertian bahwa penerapan doktrin tersebut kedalam tindakan suatu perseroan, yang menyebabkan tanggung jawab hukum hanya dimintakan dari perseroan yang telah berbentuk badan hukum, tetapi pertanggungjawaban hukum dapat pula dimintakan terhadap pemegang sahamnya, bahkan dalam perkembangannya penerapan tersebut juga membebankan kepada organ perseroan yang lain seperti Direksi dan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Hukum Direksi Setelah Perseroan Terbatas Didaftarkan dan Diumumkan

a. Masa Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pandangan Undang-Undang ini – setidaknya-tidaknya menurut pandang para Sarjana kita – untuk kondisi perseroan terbatas yang telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, apabila dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum oleh pengurus (Direksi), perseroan hanya terikat kepada pihak ketiga, demikian bertanggung jawab sepanjang Direksi dalam melakukan perbuatan hukum itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan. Demikian perseroan menjadi tidak terikat dan tidak

bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi, manakala ternyata Direksi dalam menjalankan perbuatan itu telah melampaui wewenangnya.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengertian bahwa dalam menjalankan jabatannya, Direksi harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan ;
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, dan selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu perseroan terbatas. Namun apabila tugas tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka setiap anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar nantinya di dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hendaklah diperhatikan dalam hal perubahan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang **tanggung jawab hukum** yang dibebankan kepada Direksi perseroan terbatas, dengan **tanpa** menyampingkan tanggung jawab institusi badan hukum perseroan itu sendiri, di mana secara teori hukum, perseroan yang telah memiliki kedudukan hukum yang mandiri telah mempunyai hak dan kewajiban.
2. Agar nantinya dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hendaknya juga dicermati untuk menindak lanjuti dengan adanya penerbitan peraturan pemerintah selaku peraturan pelaksanaannya serta sosialisasi di masyarakat, sebab perubahan pengaturan terhadap tanggung jawab Direksi perseroan terbatas baik sebelum dan setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman, cukup banyak hal yang harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR :

- Abdulkadir Muhammad, Prof., S.H., *Hukum Perseroan Indonesia*, cetakan Pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, cetakan kedua, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cetakan ke-4, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986)
- Anisitus Amanat, S.H.,C.N., *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, cetakan pertama (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Chatamarrasjid, Dr.,S.H.,M.H., *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, cetakan ke-2, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999)
- Gatot Supramono, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, cetakan kedua (edisi revisi), (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1999)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke-6, (Jakarta : Penerbit PN. Balai Pustaka, 1984)
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, cetakan kelima (revisi), (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995)
- Hardijan Rusli, S.H., *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cetakan Pertama, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1996)
- Huijbers, Theo, Dr., *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1990)

- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, cetakan ke-1, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, cetakan kedua, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, cetakan kedua, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Keempat*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta : Penerbit Bhurata Karya Aksara, 1982)
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, cetakan ke-8, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995)
- Rai Widjaja, I.G., S.H.,M.A., *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994)
- _____, *Hukum Perusahaan*, cetakan Pertama, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2000)
- _____, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, edisi revisi - cetakan kedua, (Jakarta : Penerbit Kesaint Blanc, 2000)
- Rochmat Soemitro. H., Prof.,Dr.,S.H., *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, cetakan Pertama, (Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1993)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1990)

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas – disertai dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, cetakan ke-3, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001)

Satrio, J., *Hukum Pribadi – Bagian I Persoon Alamiah*, cetakan ke-1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001)

_____, *Cessie, Subrogratie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*, cetakan kedua, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999)

_____, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, cetakan ketiga, (Bandung, Penerbit Alumni, 1999)

_____, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

_____, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Kedua*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994)

_____, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

_____, *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

_____, *Hukum Perikatan – Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 1*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

_____, *Hukum Perikatan – Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2*, cetakan pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Schilfgaarde, P.v., Prof.,Mr., *Hukum Belanda Baru Di Bidang Perseroan yang Bersifat Badan Hukum*, Salah satu tulisan dalam *Compendium Hukum Belanda* , (Leiden: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia – Negeri Belanda di 'S-Gravenhage, 1978)

- Soedjono Dirdjosisworo, Prof.,Dr.,S.H.,MBA., *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, cetakan Pertama, (Bandung : Penerbit PT. Mandar Maju, 1997)
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian Kedua)*, cetakan ke-3, (Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, 1985)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-5, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sri Redjeki Hartono, Prof.,Dr.,S.H., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* , cetakan I, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000)
- Subekti, Prof.,S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXVIII, (Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 1996)
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (baru) Tahun 1995 Nomor 1 – Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, cetakan ke-1, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Sunaryati Hartono, C.F.G., *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, cetakan ke-1, (Bandung : Penerbit Alumnini, 1994)
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, (Jakarta : Penerbit PT. Gunung Agung, 1983)
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 1*, cetakan ke-7, (Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, 1989)
- _____. *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis 2*, cetakan ke-5, (Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, 1990)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan YURISPRUDENSI :

Chidir Ali, S.H., *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982)

Departemen Kehakiman dan HAM, *RUU Perseroan Terbatas (versi terakhir)*, Media Notariat Edisi Januari – Maret 2001 (Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia, 2002)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 1997*, (Jakarta : Penerbit Mahkamah Agung RI, 1999)

Proyek Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, edisi pertama, (Jakarta : Proyek Elips, 1997)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, cetakan kedua, (Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika, 1999)

Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cetakan ke-7, (Jakarta : Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1983)

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, cetakan ke-24, (Jakarta:Penerbit Pradnya Paramita, 1999)

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cetakan ke-30, (Jakarta : Penerbit PT. Padnya Paramita, 1999)

Sudargo Gautama, Prof.,Mr., *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentari Jilid 4*, cetakan pertama (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1992)

_____. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentari Jilid 14* cetakan pertama (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1995)